

**Kepentingan Filipina Bergabung dalam Proyek *One Belt One Road* Tiongkok pada  
Tahun 2017**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya



Oleh :

Ida Bagus Ang Prabaraja  
125120400111062

HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019

## HALAMAN PERSETUJUAN

### KEPENTINGAN FILIPINA BERGABUNG DALAM PROYEK *ONE BELT* *ONE ROAD* TIONGKOK PADA TAHUN 2017

#### SKRIPSI

Disusun oleh :

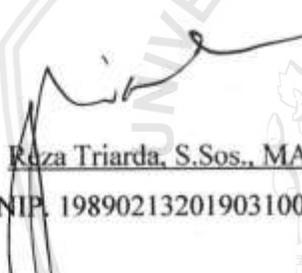
Ida Bagus Ang Prabaraja

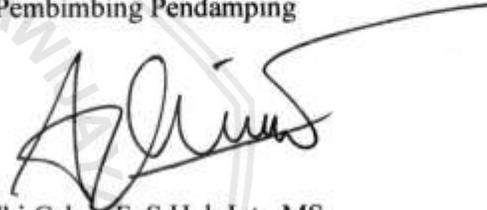
NIM : 125120400111062

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing Utama

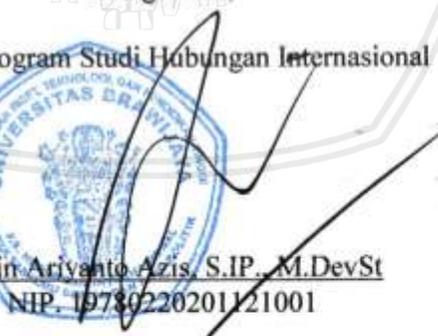
Pembimbing Pendamping

  
Reza Triarda, S.Sos., MA  
NIP. 198902132019031007

  
Adhi Cahya F, S.Hub.Int., MS  
NIK. 2018079106151001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

  
Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 19780220201121001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEPENTINGAN FILIPINA BERGABUNG DALAM PROYEK ONE BELT  
ONE ROAD TIONGKOK PADA TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

Ida Bagus Ang Prabaraja

NIM : 125120400111062

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian skripsi pada tanggal: 02 Juli 2019

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

M. Rizq Hanafi, S.IP, MIA  
NIK. 2011028002071001

Arief Setiawan, S.IP., MPS  
NIP. 198405182009011008

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Reza Triarda, S.Sos., MA  
NIP. 198902132019031007

Adhi Cahya F, S.Hub.Int., MS  
NIK. 2018079106151001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Unti Ladigdo, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 1969031419940210001

**LEMBAR PERNYATAAN**

Nama : Ida Bagus Ang Prabaraja

NIM : 125120400111062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul ***Kepentingan Filipina Bergabung dalam Proyek One Belt One Road Tiongkok pada Tahun 2017*** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-Hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi citasi dan termuat dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 16 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Ida Bagus Ang Prabaraja

NIM. 125120400111062

**Kepentingan Filipina Bergabung dalam Proyek *One Belt One Road* Tiongkok  
pada Tahun 2017**

*Oleh:*

*Ida Bagus Ang Prabaraja (125120400111062)*

**ABSTRAK**

Pada tahun 2016, Filipina melakukan pendekatan terhadap Tiongkok dengan kebijakan politik luar negerinya yang disebut sebagai *Pivot to China*. Pendekatan Filipina kemudian ditandai dengan dimasukkannya Tiongkok sebagai salah satu negara yang memberikan bantuan luar negeri pada tahun 2016 dimana pada tahun sebelumnya, Tiongkok sama sekali tidak ikut serta dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Filipina. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Duterte yang resmi menjadi presiden Filipina pada tahun yang sama. Hal ini kemudian berujung pada beberpa kerjasama yang dilakukan oleh Filipina dan Tiongkok dalam hal pembangunan infrastruktur yang disebut juga sebagai proyek *One Belt One Road* (OBOR). Perjanjian kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak pada tahun 2017 yang menyatakan pengakuannya terhadap potensi yang dimiliki OBOR sebagai sarana pengembangan infrastruktur. Kemudian Tiongkok melalui tujuannya dalam merealisasikan OBOR, memberikan dana pengembangan infrastruktur kepada Filipina. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan pendekatan Filipina yang sebelumnya lebih mengarah pada Amerika dan Jepang sebagai negara sekutunya. Filipina yang memiliki hubungan baik dengan Amerika, mengambil keputusan yang beresiko memperburuk hubungan antara Filipina dan Amerika. Dengan menggunakan Konesp Kepentingan Nasional oleh K. J. Holsti, penulis akan menganalisis apa sebenarnya kepentingan nasional yang dimiliki Filipina dalam keputusannya bergabung pada proyek OBOR yang diinisiasi oleh Tiongkok.

*Keyword: One Belt One Road, Infrastructure Development, Filipina, Kepentingan Nasional.*

**Kepentingan Filipina Bergabung dalam Proyek *One Belt One Road* Tiongkok  
pada Tahun 2017**

*By:*

*Ida Bagus Ang Prabaraja (125120400111062)*

**ABSTRACT**

In 2016, the Philippines approached China with its foreign policy as a Pivot to China. The Philippines approach was then marked by the inclusion of China as one of the countries that provided foreign aid in 2016 which in the previous year, China had not participated in providing foreign aid to the Philippines. The policy was part of the President Duterte's government who officially became president of the Philippines in the same year. This then led to several agreement carried out by the Philippines and China in terms of infrastructure development, also known as the One Belt One Road (OBOR) project. The cooperation agreement was marked by the signing of the MoU by both parties in 2017 which stated its recognition of the potential provided by OBOR as a strategic infrastructure development. China through its goal of realizing OBOR, provided funding for infrastructure development to the Philippines. This act contradicts with the Philippine approach, which previously was more directed towards America and Japan as its allies. The Philippines, that has good relations with America, makes decisions that risk the relations between Philippines and America. Using the National Interest Concept by K. J. Holsti, I will analyze what is Philippines national interest really are that led its decision to join OBOR project initiated by China.

*Keyword: One Belt One Road, Infrastructure Development, Philippines, National Interest.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Sripsi berjudul: **Kepentingan Filipina Bergabung dalam Proyek *One Belt One Road* Tiongkok pada Tahun 2017.**

Keputusan Filipina dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte untuk bergabung dalam proyek *One Belt One Road* dan menerima *Foreign Direct Investment* dari Tiongkok merupakan sebuah tindakan yang cukup kontras dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut kemudian mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian terkait isu tersebut untuk mengetahui kepentingan nasional Filipina.

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis ini nantinya diharapkan dapat menjadi bantuan sebagai referensi untuk penstudi ilmu Hubungan Internasional serta juga diharapkan akan dapat digunakan sebagai pembuktian kualitas sumber daya manusia mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya khususnya untuk program studi Hubungan Internasional. Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang akan penulis sampaikan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan rahmat dan restu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, mendorong, dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi penulis.
3. Bapak Reza Triarda selaku pembimbing satu penulis atas kesediaan waktunya untuk mau membimbing dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Adhi Cahya selaku pembimbing dua penulis yang telah bersedia membimbing penulis serta memberikan arahan kepada penulis untuk dapat melakukan penyusunan penulisan skripsi.
5. Bapak Reza Hanafi selaku Ketua Majelis Penguji atas kesediannya memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun dalam ujian skripsi penulis.
6. Bapak Arief Setiawan selaku Sekretaris Majelis Penguji atas kesediannya memberikan saran dan masukan dalam proses ujian skripsi penulis.
7. Kepada rekan-rekan HI 2012, meskipun telah banyak yang sudah lulus, tetapi masih senantiasa memberikan dukungannya, semangat, serta mau untuk melakukan diskusi bersama yang dapat memberikan pandangan terhadap penulis untuk penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis juga mengucapkan permintaan maaf atas ketidaksempurnaan yang terdapat di dalam penulisan skripsi penulis ini sehingga adanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan skripsi ini. Dan juga, penulis bangga telah menjadi bagian dari Program Studi Hubungan Internasional dan mempersembahkan penulisan skripsi ini untuk semakin memajukan program studi dan fakultas.

Malang, 16 Juli 2019

Penulis

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Lembar ini penulis akan persembahkan untuk seluruh orang yang menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Seluruh orang yang menjadi motivasi mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Yang pertama saya panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan rangkaian perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, khususnya:

Orang tua, Bapak dan Ibu yang tidak hentinya memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini serta memberikan kepercayaan kepada anakmu ini. Selain itu juga telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan tetap mendukung hingga tahap akhir perkuliahan.

Kepada Wak Putra dan Wak Ratna yang dengan kebaikan hatinya menerima saya untuk dapat tinggal di rumah berlian. Kebaikan dan ketulusan hati kalian akan selalu saya ingat hingga akhir hayat. Keberadaan kalian seperti orang tua kedua bagi saya selama tinggal di Malang. Sekali lagi terimakasih.

Kepada seseorang yang selalu menemani. Terima kasih sudah mendengar keluh kesah selama ini terutama saat-saat akan melakukan ujian skripsi.

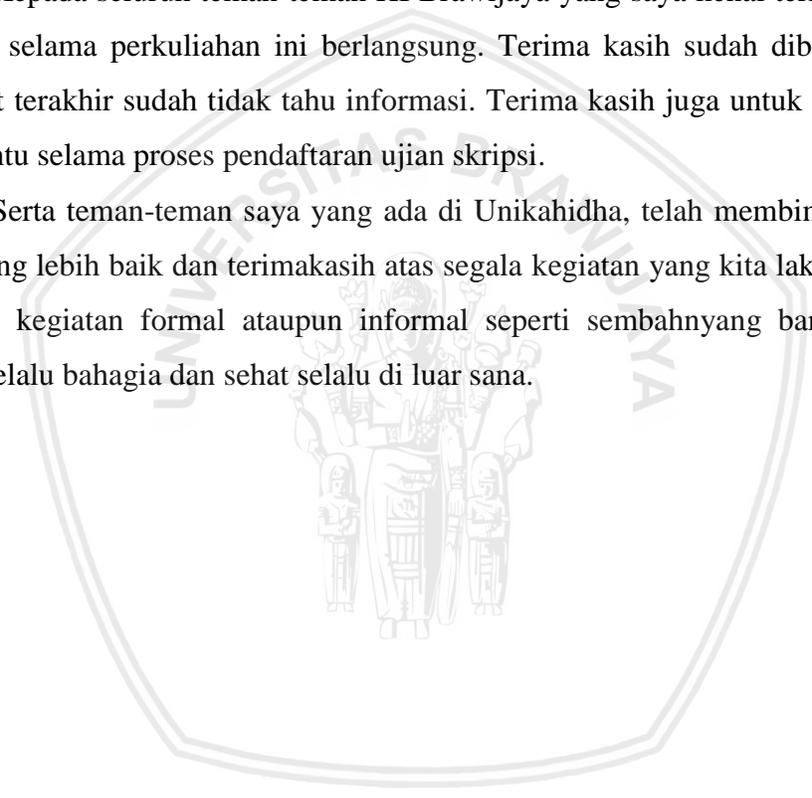
Kepada kumpulan uget-uget. Sita, Dika Lumajang, Dhandi, Ella, Dika Malang, Abbay, Erwin, Iren, Adjam, Iqbal, Aren, Mae, dan Pieter. Terima kasih sudah menemani hari-hari dari sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan menjadi teman-teman paling berarti di hidup saya. Terima kasih jalan-jalannya, segala permasalahan ataupun drama yang membuat pertemanan kita semakin erat. Terimakasih atas dukungan yang tidak ada henti-hentinya. Semoga dikemudian hari kita dapat berkumpul lagi di waktu dan tempat yang sama dengan membawa kesuksesan masing-masing.

Teman yang sempat berada satu rumah dengan saya yaitu Kresna dan Yudha, saya menantikan untuk bisa bertemu lagi dengan kalian. Untuk Kresna terimakasih sudah memotivasi saya untuk bangun pagi dan berolahraga, Yudha yang mengenalkan saya akan hal-hal baru.

Untuk teman-teman seperjuangan yang telah dan masih berjuang untuk lulus dan menjadi partner dalam mengerjakan skripsi ini, Ella, Rifat, Damai, Fida, Sielvan, Ipung, Nanda, dan masih banyak lagi, ayo kita lulus sama-sama dan menjadi sarjana S.Ip dan melepaskan status kita sebagai angkatan kritis 2012.

Kepada seluruh teman-teman HI Brawijaya yang saya kenal terima kasih atas bantuan selama perkuliahan ini berlangsung. Terima kasih sudah dibantu terutama saat-saat terakhir sudah tidak tahu informasi. Terima kasih juga untuk lita arif sudah membantu selama proses pendaftaran ujian skripsi.

Serta teman-teman saya yang ada di UnikaHidha, telah membimbing saya ke jalan yang lebih baik dan terimakasih atas segala kegiatan yang kita lakukan bersama baik itu kegiatan formal ataupun informal seperti sembahnyang bareng. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu di luar sana.



## Daftar Isi

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1.4.1 Manfaat Akademis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Studi Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.1 Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Operasionalisasi Konsep .....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Alur Pemikiran .....</b>	<b>35</b>
<b>2.5 Argumen Utama .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>37</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>37</b>

3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4	Teknik Analisa Data .....	38
3.5	Sistematika Penelitian.....	40
<b>BAB IV</b>	.....	<b>43</b>
4.1	Proyek OBOR dalam Regional Asia .....	43
4.2	Filipina dan Bantuan Luar Negeri .....	48
4.3	Program <i>Build, Build, Build</i> (BBB) dalam Masa Pemerintahan Duterte .....	52
<b>BAB V</b>	.....	<b>56</b>
<b>KEPENTINGAN NASIONAL FILIPINA DALAM BERGABUNG PADA PROYEK ONE BELT ONE ROAD.....</b>		<b>56</b>
5.1	Kepentingan dan Nilai “Inti” Filipina .....	56
5.2	Kepentingan Jangka Menengah .....	61
5.2.1	<i>Economic Development Opportunities</i> .....	62
5.2.2	Filipina dan Usahanya Meningkatkan Prestise Negara.....	65
5.2.3	<i>Self Extention</i> Filipina ke Tiongkok.....	70
5.3	Kepentingan Jangka Panjang Filipina.....	72
<b>BAB IV</b>	.....	<b>76</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>76</b>
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran .....	78
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>79</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep.....	33
Tabel 2. Total ODA Berdasarkan Kerjasama Pembangunan (dalam Juta USD).....	50
Tabel 3. Proyek dengan Dana ODA Tiongkok.....	52



## Daftar Gambar

Gambar 1. Tingkat Variabel Kepentingan.....	26
Gambar 2. Timeline Kejadian Penting OBOR.....	47
Gambar 3. Pengeluaran Infrastruktur Filipina 2011-2016.....	55
Gambar 4. Peringkat Filipina dalam Global Competitiveness Index 2018.....	68



## Daftar Bagan

Bagan 1. FDI Filipina tahun 2014-2018 .....	58
Bagan 2. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Negara.....	70



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2013, Tiongkok melakukan pertemuan terkait kebijakan luar negeri yang bertemakan “*Pheriperal Diplomacy*” dimana mereka menyatakan bawa negara tetangga Tiongkok khususnya kawasan Asia Pasifik, memiliki nilai strategis yang sangat signifikan dalam memperkuat perekonomian dan bergantung pada kerjasama kemanan.<sup>1</sup> Tiongkok dalam kerjasama bilateral dengan Pakistan melalui *Tiongkok-Pakistan Economic Corridor* yang dibentuk pada tahun 2013 merupakan salah satu bentuk konkrit dari tujuan yang sebelumnya dikemukakan.<sup>2</sup> Kerjasama ini merefleksikan kebijakan luar negeri Cina yang berusaha mengembangkan potensi regional dalam bidang infrastruktur yang berfokus pada pembangunan *High-Speed Rail Road* yang menghubungkan antara Kota Kashgar di Xinjiang Tiongkok, dengan Gwadar di provinsi Baluchistan Pakistan.<sup>3</sup> Kejasama dengan Pakistan dilakukan mengingat negara ini merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian strategis yang menghubungkan negara-negara di Asia dengan negara Timur-Tengah.<sup>4</sup> Akses tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur ke Pakistan. Terinspirasi dari kerjasama ini, Tiongkok mulai memperluas agendanya dengan membuat kebijakan luar negeri yang hampir

---

<sup>1</sup> Peter Cai. 2017. *Understanding Tiongkok's Belt and Road Initiative*. Lowy Institute. halaman 3.

<sup>2</sup> *Tiongkok Pakistan Economic Corridor, FAQs*, <http://cpec.gov.pk/faqs>, diakses pada 15 November 2017

<sup>3</sup> Peter Cai, op.cit, halaman 4.

<sup>4</sup> Samra Sarfraz Khan, 2011, *Tibet and the Pakistan-Tiongkok Strategic Partnership*, halaman 69.

serupa dengan *Tiongkok-Pakistan Corridor* tetapi dalam tingkat yang lebih luas. Salah satunya dengan mengeluarkan program *The Belt and Road Initiative* atau juga disebut dengan *One Belt One Road* (OBOR). OBOR sendiri tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur kereta api, tetapi juga pembangunan jalur maritim yang menghubungkan jalur perdagangan laut dari Tiongkok ke Eropa yang lebih spesifik disebut dengan *Maritime Silk Road*.

Dimulai dari diperkenalkannya visi kerjasama yang melibatkan Tiongkok dengan Asia Tengah untuk membangun jalur sutra perekonomian oleh Presiden Xi Jinping pada bulan September 2013.<sup>5</sup> Pada pidatonya di Universitas Nazabayev Kazakhstan merupakan kali pertama visi tersebut dikemukakan kepada publik.<sup>6</sup> Selanjutnya pada tahun 2014 Tiongkok secara resmi memperkenalkan OBOR di dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional Tiongkok pada Konferensi *Central Economic Work* yang diadakan setiap tahunnya dengan melibatkan pembuat kebijakan.<sup>7</sup> Program ini diestimasikan akan membutuhkan dana sebanyak 5 Triliun USD dan melibatkan lebih dari 60 negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> The State Council The People's Republic of Tiongkok, 28 Maret 2015, *Chronology of Tiongkok's Belt and Road Initiative*, [http://english.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.html](http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.html), diakses pada 1 Juni 2017

<sup>6</sup> Ibid, diakses pada 1 Juni 2017

<sup>7</sup> Peter Cai, op.cit., halaman 6

<sup>8</sup> Quartz, 15 Mei 2017, *Your guide to understanding OBOR, Tiongkok's new Silk Road Plan*, <http://www.business.hsbc.com/belt-and-road/guide-to-understanding-obor#>, diakses pada 1 Juni 2017

Tiongkok secara resmi memasukkan agenda ini pada *Five Year Plan* ke-13 tahun 2016-2020 yang masuk dalam usaha Tiongkok membuka diri kepada negara lain.<sup>9</sup>

OBOR sendiri merupakan salah satu mega proyek Tiongkok yang bertujuan untuk membuat jalur penghubung perekonomian dunia dalam bentuk infrastruktur yang akan mempermudah berjalannya hubungan ekonomi yang terhubung dan dilalui oleh jalur ini.<sup>10</sup> OBOR sendiri memiliki dua jalur yang masing-masing menghubungkan negara-negara yang akan dilewatinya via darat dan laut. Jalur ini ditargetkan untuk menghubungkan dan mendorong kerja sama Tiongkok dengan negara-negara di Eurasia, Timur Tengah, dan Afrika melalui jalur darat maupun laut.<sup>11</sup> Untuk jalur darat dari proyek ini, Tiongkok menargetkan jalur penghubung melalui Xi'an yang berada di negaranya menuju Eropa dengan melewati negara-negara seperti Iran, Turki, Rusia, dan berujung di Italia. Untuk jalur lautnya sendiri, dimulai dari Kota Fuzhou di Tiongkok dengan melewati jalur laut Asia Tenggara melalui Laut China Selatan dan selat Malaka menuju India, Afrika, dan berujung di Italia. Pada akhirnya jalur tersebut akan membentuk koneksi yang terhubung secara menyeluruh. Tiongkok untuk pertama kalinya mengadakan KTT OBOR pada tanggal 14-15 Mei 2017 yang dihadiri oleh 57 perwakilan negara di dunia.<sup>12</sup> Tiongkok sendiri

---

<sup>9</sup> Central Committee of the Communist Party of Tiongkok, *The 13<sup>th</sup> Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of Tiongkok (2016-2020)*, Central Compilation & Translation Press, Chapter 51.

<sup>10</sup> The State Council The People's Republic of Tiongkok, 30 Maret 2015, *Full Text: Action Plan on the Belt and Road Initiative*, [http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content\\_281475080249035.html](http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.html), diakses pada 1 Juni 2017.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> The Diplomat, 12 Mei 2017, Belt and Road Attendees List, <https://thediplomat.com/2017/05/belt-and-road-attendees-list/>, diakses pada 10 Januari 2018.

mengklaim berhasil mengumpulkan USD 1 triliun yang dinvestasikan ke dalam proyek ini.<sup>13</sup>

Pengembangan hubungan antara Tiongkok dan negara-negara di Asia, tidak luput pengaruh Amerika. Amerika membentuk fokus pengembangan perdagangan yang disebut dengan *Pivot to Asia* yang telah dimulai sejak tahun 2011.<sup>14</sup> Menurut Justin Yifu Lin, yang merupakan penasihat kebijakan dan juga sebagai mantan *chief economist* di Bank Dunia, melihat bahwa pembentukan proyek OBOR ini merupakan alat untuk melawan usaha Amerika dalam bentuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang dikeluarkan di bawah pemerintahan Obama.<sup>15</sup> Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan mantan Jendral Tiongkok Qiao Liang yang menyebutkan bahwa OBOR merupakan “strategi untuk melawan perpindahan Amerika ke Timur” pada tahun 2015.<sup>16</sup> Selain itu Amerika juga berfokus dalam membangun kekuatan kerjasama militernya dengan negara-negara sekutu seperti Jepang dan Australia.<sup>17</sup> Hal ini memunculkan fokus baru dalam pemerintahan Xi Jinping untuk lebih memperhatikan regional Asia-Pasifik agar pengaruhnya tidak digeser oleh Amerika.

Pada tahun 2014, OBOR secara resmi diperkenalkan kepada dunia bersamaan dengan terbentuknya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). AIIB sendiri

---

<sup>13</sup>CNN, 12 Mei 2017, *Just what is this One Belt, One Road thing anyway?*, <http://edition.cnn.com/2017/05/11/asia/Tiongkok-one-belt-one-road-explainer/>, diakses pada 1 Juni 2017.

<sup>14</sup> Rumi Aoyama, *One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy*, Routledge, 2016, halaman 5.

<sup>15</sup> Peter Cai. 2017. *Understanding Tiongkok's Belt and Road Initiative*. Lowy Institute, halaman 5.

<sup>16</sup> Council of Foreign Relations, *Tiongkok's Massive Belt and Road Initiative*, <https://www.cfr.org/backgrounder/Tiongkoks-massive-belt-and-road-initiative>, diakses pada 25 Juni 2019.

<sup>17</sup> Rumi Aoyama, op.cit, halaman 5.

merupakan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan dan digunakan untuk mengembangkan proyek ini.<sup>18</sup> Sebanyak 21 negara turut serta dalam isntitusi tersebut termasuk juga Filipina. Filipina merupakan negara terakhir yang mengajukan diri sebagai anggota AIIB. Pada tahun 2014, hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok sendiri mengalami gejolak yang bermula pada klaim Laut China Selatan oleh Tiongkok pada tahun 2009 dengan mengajukan wilayah teritorial baru kepada PBB yang mencakup Laut China Selatan sebagai bagian dari teritorialnya.<sup>19</sup> Hal ini kemudian ditentang oleh banyak negara termasuk Filipina.

Filipina yang merupakan negara yang memiliki kepemilikan secara resmi terhadap Laut China Selatan pun melakukan pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional, yang berisikan 15 tuntutan tentang kepemilikan teritorial ini.<sup>20</sup> Kemudian Mahkamah Arbitrase Internasional mengatakan bahwa tujuh dari 15 kalim tersebut akan dipertimbangkan pada tahun 2015.<sup>21</sup> Hal ini membuat kondisi hubungan antara Filipina dan Tiongkok semakin memanas. Pada tahun 2016, kemudian pengadilan memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar historis dalam kepemilikan Laut China Selatan dan keputusan ini sendiri mendapat respon positif oleh Filipina.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Congressional Research Service, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), <https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf>, diakses pada 24 Juni 2019.

<sup>19</sup> Tempo, 12 Juli 2016, Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut China Selatan, <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan/full&view=ok>, diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Setelah kejadian tersebut, pada tahun 2016 Filipina mengangkat presiden baru yaitu Rodrigo Duterte.<sup>23</sup> Dalam enam bulan pemerintahannya, diwarnai oleh kebijakan yang cukup kontroversial dimana lebih dari 6000 orang dinyatakan meninggal dalam kebijakannya menangani peredaran narkoba di Filipina.<sup>24</sup> Hal ini menyebabkan Duterte mendapatkan banyak kecamaran dari berbagai kalangan seperti organisasi Hak Asasi Manusia termasuk dari Amerika.<sup>25</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Obama untuk menangani masalah Narkoba dengan cara yang benar dan menyinggung soal penegakan HAM di Filipina.<sup>26</sup> Tetapi hal tersebut dibalas oleh Duterte dengan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Obama dan menyebabkan dibatalkannya rencana pertemuan antara Obama dan Duterte yang seharusnya diadakan sebelum pertemuan ASEAN di Laos.<sup>27</sup> Hal ini kembali memanas ketika Duterte memberikan pidatonya dan menyinggung Amerika soal pembunuhan yang dilakukan oleh AS di negaranya saat jaman kolonial.<sup>28</sup>

Kejadian tersebut merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hubungan Filipina-Amerika menjauh yang menyebabkan terhambatnya beberapa kerjasama termasuk kerjasama militer yang dilakukan kedua negara. Ditambah lagi dengan arah politik luar negeri yang menunjukkan kecenderungan Filipina untuk mendekati

---

<sup>23</sup> Michael Ray, 14 Mei 2019, *Rodrigo Duterte: Presiden of the Philippines*, <https://www.britannica.com/topic/Rodrigo-Duterte>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Dharel Placido, 8 September 2016, ABS-CBN News, *Obama to Duterte: Do war on drugs 'the right way'*, <https://news.abs-cbn.com/news/09/08/16/obama-to-duterte-do-war-on-drugs-the-right-way>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Rappler, 8 September 2016, *Obama, Duterte Clash Over Brutal Crime War*, <https://www.rappler.com/nation/145656-duterte-obama-clash-crime-drug-war>, diakses pada tanggal 30 Juni 2013.

Tiongkok yang diungkapkan oleh Duterte saat kunjungan negara ke Tiongkok Oktober 2016 tidak berselang lama dari kejadian yang melibatkan AS dan Filipina.<sup>29</sup> Dalam pertemuan tersebut Duterte menyebutkan bahwa dirinya telah “memisahkan diri” dari AS untuk selanjutnya akan bergantung pada Tiongkok.<sup>30</sup> Hal ini kemudian disebut sebagai usaha Filipina untuk melakukan atau disebut juga sebagai *Pivot to China*.

Selain membawa perubahan terkait kebijakan politik luar negeri, Filipina dalam pemerintahan Duterte juga membawa kebijakan baru terkait dengan pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur merupakan proyek yang pendanaannya dilakukan melalui sektor publik dan privat yang disebut sebagai *Public-Privat Partnership Program* (PPP).<sup>31</sup> Pada tahun 2015, Filipina sama sekali tidak menggunakan ODA dari Tiongkok dimana untuk ODA sendiri, Filipina memiliki sumbangan dana terbesar oleh Jepang melalui JICA dengan total mencapai USD 5.52 Miliar.<sup>32</sup> Selain Jepang, Filipina juga menggunakan ODA yang disediakan melalui kerjasama dengan World Bank, *Asian Development Bank* (ADB), dan Amerika melalui USAID.<sup>33</sup> Bersamaan dengan terpilihnya Presiden Duterte pada tahun 2016,

---

<sup>29</sup> Foreign Service Institute, *The Belt and Road Initiative and Philippine Participation in the Maritime Silk Road*, <http://www.fsi.gov.ph/the-belt-and-road-initiative-and-philippine-participation-in-the-maritime-silk-road/>, diakses pada 30 Juni 2019.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> PPP Center, *Philippines sending more on infrastructure, Aquino tells investors*, [https://ppp.gov.ph/in\\_the\\_news/philippines-spending-more-on-infrastructure-aquino-tells-investors/](https://ppp.gov.ph/in_the_news/philippines-spending-more-on-infrastructure-aquino-tells-investors/), diakses pada tanggal 4 Juli 2019

<sup>32</sup> ODA Portofolio Review Report 2015, <http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/01/CY-2015-ODA-Portfolio-Review-Report.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019

<sup>33</sup> Ibid.

kebijakan ODA yang dilakukan oleh Filipina mulai memasukkan Tiongkok dalam daftar negara yang memberikan bantuan luar negeri baik itu secara *grant* ataupun *loan*.<sup>34</sup> Walaupun total dari bantuan luar negeri Tiongkok tidak sebesar negara-negara yang telah menjalin kerjasama dengan Filipina sebelumnya, hal ini tetap merupakan langkah awal kerjasama bilateral yang melibatkan Tiongkok.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Filipina dan Tiongkok yang bersisikan kesepakatan bekerjasama dalam proyek OBOR.<sup>35</sup> Dalam MoU tersebut, Filipina dan Tiongkok setuju untuk membangun perdagangan dan jaringan infrastruktur dengan berpegangan pada prinsip “saling menghargai terhadap integritas teritorial dan kedaulatan”.<sup>36</sup> Dengan ditandatanganinya MoU antara Filipina dan Tiongkok, maka kedua negara sepakat dalam pembangunan OBOR yang dilakukan dalam bentuk pengembangan sarana infrastruktur pendukung di Filipina. Hal ini sejalan dengan program pembangunan oleh Duterte yang disebut sebagai *Build, Build, Build Program*.<sup>37</sup> Program ini dibentuk berdasarkan premis bahwa infrastruktur yang baik, merupakan sebuah kondisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.<sup>38</sup> Terlebih lagi, Filipina merupakan salah satu negara di ASEAN dengan peringkat terbawah dalam sektor infrastruktur

---

<sup>34</sup> ODA Portofolio Review Report 2016, <http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/ODA-2016-As-of-August-22-2017.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

<sup>35</sup> Darryl John Esguerra, 27 November 2018, PH-China MoU on Belt and Road Initiative, <https://globalnation.inquirer.net/171728/read-ph-china-mou-on-belt-and-road-initiative>, diakses pada tanggal 4 Juli 2019.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Darlene V. Estrada, China's Belt and Road Initiative Implication for the Philippines. <http://www.fsi.gov.ph/chinas-belt-and-road-initiative-implications-for-the-philippines/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2019.

<sup>38</sup> Ibid.

pada tahun 2010 berdasarkan *World Economic Forum Competitiveness Ranking*.<sup>39</sup> Hal ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di Filipina merupakan sektor yang harus dikembangkan lagi. Pengembangan sektor ini kemudian diharapkan akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Filipina kedepannya.

Keputusan yang dilakukan oleh Filipina merupakan keputusan yang perlu dipertanyakan. Dengan melihat sejarah hubungan antara Filipina dan Tiongkok yang kurang baik, Filipina memberikan peluang bagi kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengapa Filipina mengambil keputusan yang cukup kontradiktif dengan sejarah hubungannya dengan Tiongkok.

## 1.2 Rumusan Masalah

“Apa kepentingan nasional Filipina bergabung dalam kerjasama *Proyek One Belt One Road* oleh Tiongkok?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan untuk menjelaskan apa kepentingan Filipina ketika mereka bergabung pada kerjasama *One Belt One Road* yang dikeluarkan oleh Tiongkok.

---

<sup>39</sup> Ibid.

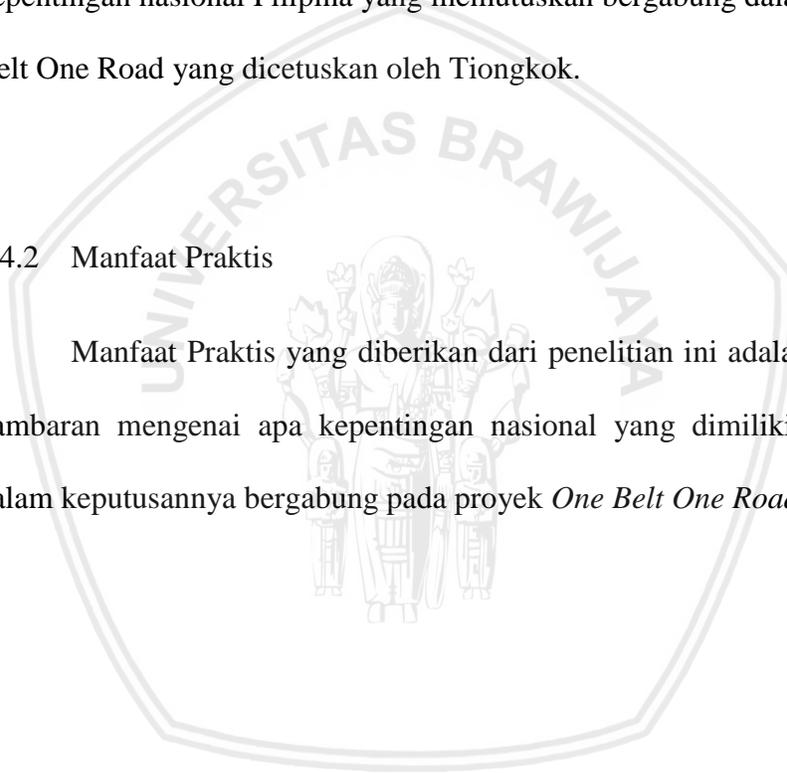
## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi peneliti lain yang berminat dalam kajian Hubungan Internasional khususnya tentang kerjasama bilateral dan hubungannya dengan kepentingan nasional suatu negara dalam hal ini kepentingan nasional Filipina yang memutuskan bergabung dalam proyek One Belt One Road yang dicetuskan oleh Tiongkok.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diberikan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai apa kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam keputusannya bergabung pada proyek *One Belt One Road* Tiongkok.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Terdahulu

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal ilmiah yang secara tidak langsung dapat mempermudah dalam melakukan analisis yang lebih dalam dan membatasi penulis dalam menganalisis isu ini. Jurnal pertama yang penulis gunakan adalah sebuah jurnal oleh Rumi Aoyama yang berjudul *One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy*.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rumi Aoyama ini, beliau meneliti bagaimana perilaku dari kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping dengan fokus kebijakan pada Proyek *One Belt One Road* (OBOR) yang diinisiasi oleh Tiongkok.<sup>40</sup> Dijelaskan dalam jurnal ini bahwa proyek OBOR bukan hanya sebagai kebijakan regional saja melainkan sebuah strategi global Tiongkok untuk mencapai kepentingannya yang disebut sebagai *Chinese Dream*.<sup>41</sup> Sebagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis regional, kebijakan ini tidak serta-merta murni sebagai kebijakan regional saja melainkan terdapat tujuan yang lebih luas sebagai strategi global dalam mencapai kepentingannya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Rumi Aoyama, *One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy*, Routledge, 2016, Hal 3.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

Fokus utama dalam jurnal pertama adalah menjelaskan bagaimana proyek OBOR ini menjadi bagian penting dalam usaha Tiongkok membentuk sebuah strategi yang memiliki ruang lingkup global. Sebagai salah satu kebijakan luar negeri, proyek OBOR merupakan bentuk dari ambisi Presiden Xi Jinping yang memiliki moto “*The Great Rejuvenation of the Chinese Nation*” atau peremajaan Tiongkok secara besar-besaran yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2021.<sup>43</sup> Salah satu tujuannya adalah melipat gandakan pemasukan GDP dibandingkan pada tahun 2010 dan meningkatkan pengaruh ekonomi politik di Asia maupun dunia.<sup>44</sup> Secara tidak langsung Tiongkok melalui pemerintahan Xi Jinping memiliki ambisi untuk dapat meningkatkan kekuatannya dalam bidang ekonomi yang akhirnya berdampak pada posisi dimana negaranya dapat memengaruhi aktor-aktor pada tingkat global. Tiongkok memiliki tiga poin utama dalam melakukan kebijakan luarnegerinya yaitu, meningkatkan stabilitas hubungan Tiongkok-Amerika, membentuk dan menambah pengaruhnya dalam komunitas internasional, dan tidak mengorbankan kepentingan utama negaranya.<sup>45</sup> Perlu digarisbawahi bahwa membentuk hubungan yang baik dengan Amerika merupakan hal yang penting di bawah pemerintahan Xi Jinping maka hal ini menjadi urgensi tersendiri bagi Tiongkok.<sup>46</sup>

Dalam jurnal ini juga diterangkan apa itu OBOR dan apa sebenarnya yang mendorong Tiongkok dalam membuat kebijakan ini. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan yang paling besar di Asia, Tiongkok merupakan salah satu negara

---

<sup>43</sup> Ibid, Hal 4.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

yang berpengaruh dalam hubungan negara-negara di sekitarnya khususnya Asia. Pembentukan Proyek OBOR ini sendiri merupakan jawaban dari usaha Amerika untuk memperluas pengaruhnya di Asia melalui pernyataannya yang disebut sebagai *pivot to Asia*.<sup>47</sup> Salah satu tindakan Amerika sendiri antara lain membentuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang dapat memperkuat kerjasama militernya dengan negara-negara di Asia-Pasifik khususnya Jepang dan Australia.<sup>48</sup> Hal ini diinterpretasikan oleh Tiongkok sebagai strategi untuk “menahan” negaranya, dimana hal tersebut dianggap sangat berbahaya.<sup>49</sup>

OBOR menjadi salah satu kebijakan yang terbentuk sebagai strategi menciptakan pasar yang luas dengan memperkuat hubungan Tiongkok dan berbagai negara di Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara, dan Asia Selatan terlebih lagi mengurangi kelebihan produksi domestik melalui ekspor dan mendorong ekonominya.<sup>50</sup> Kelebihan produksi domestik sendiri merupakan masalah dalam negeri yang sangat terbantu jika OBOR dapat terlaksana, karena dengan membentuk jalur transportasi yang menghubungkan banyak negara, Tiongkok dapat menyalurkan kelebihan produksinya secara lebih efektif. Pada tahun 2015 sendiri, Tiongkok akhirnya mengeluarkan konsep OBOR dengan mendirikan enam koridor ekonomi internasional dengan perkiraan total investasi sebanyak \$890 miliar atau lebih.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, Hal 5.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid, Hal 6

Sebagai strategi global, OBOR memiliki dua karakteristik yaitu, sebagai perluasan rute diplomatik di masa mendatang, dan sebagai aspek baru yang diinginkan pada pemerintahan Xi Jinping.<sup>52</sup> Terlihat dari dua karakteristik ini, Tiongkok melihat aspek yang berfokus pada dampak jangka panjang dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan oleh Tiongkok sebelumnya yang lebih berfokus untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lainnya di Asia, Timur Tengah, Eropa maupun negara-negara di Kepulauan Pasifik.<sup>53</sup>

Dalam tulisan di atas dapat diketahui bahwa analisis yang dilakukan lebih kepada bagaimana cara Tiongkok menggunakan OBOR sebagai alat dalam memenuhi strategi global Tiongkok. Persamaan dari tulisan ini adalah sama-sama menganalisis isu OBOR sebagai objek penelitian, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memahami kasus OBOR. Perbedaan alat analisis dimana tulisan di atas menggunakan pandangan strategi global, sedangkan penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional oleh K. J. Holsti

Jurnal kedua yang penulis pakai berjudul *Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Selandia Baru Dalam Bidang Energi Gheothermal* yang ditulis oleh Melia pada tahun 2011. Tulisan Melia Indri membahas tentang kerjasama dalam bidang energi tentang energi panas bumi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Selandia Baru.

---

<sup>52</sup> Ibid, Hal 7.

<sup>53</sup> Ibid, Hal 8.

Melia menulis dari awal tentang *Gheothermal* lalu merunjuk kedalam kerjasama dan fungsi kerjasama bilateral antar kedua negara, Melia menuliskan tentang motif dan kepentingan Indonesia dalam kerja sama ini, ia melihat dari sisi kepentingan energi sebagai kepentingan yang vital (*core*) dan merujuk kepada kepentingan ekonomi, serta kesempatan dan pembangunan Indonesia<sup>54</sup>. Melia juga menuliskan tentang keterkaitan kerja sama ini dengan nilai – nilai demokrasi dan kebebasan pasar dalam pembangunan.

Penulis melihat tulisan Melia dapat digunakan sebagai rujukan teori yang sama dengan penelitian yang penulis tulis namun di beberapa sisi memiliki perbedaan. Melia menulis tentang kebijakan nasional atau prilaku negara terkait dengan energi panas bumi, penulis meneliti tentang kebijakan nasional atau prilaku negara terkait dengan pembangunan infrastruktur lebih spesifik pada Filipina. Hal ini kemudia diharapkan akan memberikan kemudahan bagi penulis dalam membahas isu yang dipilih dengan menggunakan konsep kepentingan nasional.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam menjelaskan tulisan ini, penulis akan menggunakan konsep yang dapat menjelaskan kenapa Filipina bersedia masuk ke dalam kebijakan One Belt One Road yang dibuat oleh Tiongkok. Untuk menjelaskan hal tersebut, konsep *National Interest* atau Kepentingan Nasional oleh K.J Holsti merupakan konsep yang tepat dengan

---

<sup>54</sup> Indri, Melia. *Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Dengan Selandia Baru Dalam Bidang Energi Gheothermal*, Riau. 2011

melihat bagaimana kepentingan nasional Filipina dalam keputusan mereka bergabung dalam proyek ini. Jika dilihat dari terpilihnya Rodrigo Duterte pada tahun 2016 sebagai Presiden Filipina, pendekatannya terhadap Tiongkok dapat terbilang lebih intens dalam hubungan bilateral. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan 16 proyek kerjasama bilateral oleh Filipina dan Tiongkok dalam mengembangkan proyek infrastruktur di negaranya. Sebelumnya pendekatan yang dilakukan oleh Filipina lebih mengarah pada konflik sengketa yang melibatkan militer masing-masing negara. Pendanaan yang diberikan sendiri merupakan bagian dari AIIB sebagai instrumen pendanaan proyek OBOR.

### 2.2.1 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional sebuah negara dijelaskan oleh Holsti sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan suatu negara yang ingin dicapai.<sup>55</sup> Tujuan tersebut merupakan bagian dari keinginan suatu negara untuk mengembangkan negaranya menuju perkembangan yang lebih baik. Pada tulisannya, Holsti mengatakan bahwa Kepentingan Nasional, walaupun dapat diartikan sebagai tujuan politik luar negeri, hal ini tidak berlaku secara *vice-versa*. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan politik Luar negeri, tetapi tujuan politik belum tentu dapat diartikan sepenuhnya sebagai Kepentingan Nasional suatu negara karena dalam praktiknya, pemerintahan terkadang mengambil keputusan dikarenakan adanya tekanan dari

---

<sup>55</sup> Holsti, K.J. 1983. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*. Edisi Keempat Jilid 1. Airlangga. Hlm 130.

pihak/negara lain baik itu internal maupun eksternal, atau untuk menanggapi krisis serta untuk melaksanakan komitmen domestik yang mana tidak ada kaitannya dengan tujuan politik luar negeri.<sup>56</sup> Jadi, sebuah kepentingan nasional suatu negara dapat diartikan sebagai segala hal atau tidakan yang diambil oleh pemerintah demi mencapai tujuan atau keadaan yang diinginkan. Dalam mendefinisikan Kepentingan Nasional suatu negara, Holsti membagi tiga kategori yang dapat menjelaskan hal tersebut, antara lain:

#### 2.2.1.1 Kepentingan dan Nilai “Inti” (*Core Values*)

Kepentingan dan nilai inti dapat diartikan sebagai jenis kepentingan yang dicapai oleh suatu negara dengan kesediaannya melakukan pengorbanan yang besar. Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan keselamatan diri atau (*self – preservation*) dari suatu unit politik.<sup>57</sup> Kepentingan dan nilai inti merupakan kepentingan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif pendek dan berkelanjutan. Hal ini merupakan tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan lain yang cukup sulit tercapai ketika hal tersebut tidak dilakukan. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari kepentingan suatu negara untuk mempertahankan keselamatan dirinya atau *self-preservation*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, hal 173.

<sup>57</sup> Ibid, hal 174.

<sup>58</sup> Ibid.

Holsti menyebutkan bahwa *Self-preservation* yang dimaksud dapat juga diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan berkaitan dengan nilai kedaulatan suatu negara.

***“Kepentingan utama untuk negara saat ini sebagai tujuan politik adalah untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan serta memelihara kelangsungan sistem politik, sosial dan ekonomi di wilayahnya “.<sup>59</sup>***

Kedaulatan dan kemerdekaan yang dimaksud oleh Holsti adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan wilayah, pengaruh dan atau keberlangsungan pemerintahannya.<sup>60</sup> Tetapi, Holsti menegaskan bahwa Kepentingan dan nilai inti tersebut dapat didefinisikan secara berbeda tergantung dari sikap para pembuat kebijakan yang ada di negara tersebut.<sup>61</sup>

Dalam bukunya, disebutkan bahwa “memelihara kelangsungan sistem politik, sosial, dan ekonomi di wilayahnya.<sup>62</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa untuk melakukan penegakan kedaulatan atau memperkuat pengaruh di dalam wilayahnya maupun pengaruh di dalam sistem regional atau wilayah negara lain. Holsti melakukan banyak versi definisi, dimana bagi sebagian negara menjaga wilayah

---

<sup>59</sup> Ibid, hal 177

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

kolonial atau negara jajahan adalah sebuah kepentingan inti dari negara tersebut.<sup>63</sup> Namun di sisi lain, pada sebagian negara hal tersebut (pengaruh pada wilayah kolonial) diberikan secara sukarela dengan memerdekakan negara koloni mereka.<sup>64</sup>

Penggambaran menurut Holsti tentang bagaimana kelangsungan atau kestabilan negara dalam suatu pemerintahan adalah suatu tujuan politik inti yang harus diamankan sebelum tujuan politik lain menunjukkan bahwa ada indikasi strata dalam kepentingan nasional. Dalam bukunya, Holsti juga menjelaskan bahwa kepentingan dan nilai inti adalah suatu hal yang krusial untuk negara dan dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat sebagai dasar negara.<sup>65</sup> Sebagai suatu dasar kebutuhan negara, Kepentingan Inti harus terlaksana dan dapat dikendalikan karena berkaitan dengan kelangsungan negara dan *self-preservation*.<sup>66</sup>

#### 2.2.1.2 Tujuan Jangka Menengah (*Middle Range Objectives*)

Tujuan jangka menengah merupakan kepentingan yang berfokus pada perbaikan atau pengembangan perekonomian suatu negara. Kepentingan ini dicapai oleh suatu negara, dengan memberikan suatu

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

tuntutan atau melakukan interaksi kepada suatu negara atau aktor lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.

Kepentingan ini disebut sebagai kepentingan jangka menengah dikarenakan untuk mencapai kepentingan ini dibutuhkan waktu yang tidak singkat.<sup>67</sup> Dalam kepentingan ini, peran pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dan tuntutan akan sebuah perkembangan ekonomi domestik negaranya. Namun, pada kenyataannya negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dikarenakan keterbatasan baik dari sisi sumber daya, jasa administrasi, maupun keterbatasan akan keterampilan teknis. Maka, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain dalam upayanya memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>68</sup>

Perbedaan antara Tujuan Menengah dengan Kepentingan Inti dalam hal ekonomi adalah *Self-preservation* dan *Self-extention*. Dimana dalam kepentingan dan nilai inti yang dilihat adalah kestabilan keadaan ekonomi dalam negeri dan bagaimana tindakan negara untuk mencapai hal tersebut dan mempertahankannya, dan sekali lagi hal ini bersifat krusial sehingga harus didapatkan sesegera mungkin, karena kembali lagi pada kepentingan dan nilai inti berkaitan dengan kedaulatan dan tujuan lain akan sulit tercapapai apabila tujuan ini tidak terpenuhi (merujuk pada kepentingan dan nilai

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

“inti” terkadang bukan tujuan melainkan sebuah tuntutan domestik atau tekanan eksternal).<sup>69</sup>

Tujuan jangka menengah suatu negara, memiliki pemetaan tujuan yang lebih kompleks dibandingkan kepentingan jangka pendek, dimana negara memenuhi kebutuhan nasional melalui tindakan yang berskala internasional terutama dalam mencapai perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti pembuatan akses bantuan luar negeri, ketersediaan lapangan kerja, bahkan tingkat kebanggaan negara pada masyarakat nasional, dan ahli teknologi dan ilmu pengetahuan. Objektif jangka menengah sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Develop Economic Oppurtunites*

Perdagangan luar negeri merupakan aktivitas yang dilakukan negara berkembang dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Untuk mencapai perkembangan ekonomi, suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain baik yang berada dalam satu kawasan regional maupun entitas eksternal lainnya.<sup>70</sup> Beberapa indikator yang menjadi tanda bahwa negara tersebut mengalami perkembangan ekonomi, antara lain dengan melihat peningkatan aktivitas perdagangan baik itu impor maupun ekspor, bertambahnya bantuan luar negeri, mudahnya

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 170.

<sup>70</sup> Ibid.

mencapai akses pasar, terdapat alih teknologi yang baik dan mampu menangani minimnya ketersediaan sumber daya domestik.<sup>71</sup>

## 2. *Increase a State's Prestige in the System*

Prestise (*Prestige*) suatu negara merupakan hal yang menjadi tujuan negara dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Bentuknya dapat dilihat melalui kekuatan militer, kemampuan untuk melakukan diplomasi, dan juga peningkatan ilmu dan teknologi menuju negara industri. Dalam era ini, sistem internasional lebih cenderung menggunakan aspek ekonomi sebagai *hard power*, selain kekuatan militer.<sup>72</sup> Prestise sendiri diukur dengan tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi.<sup>73</sup> Hal lain yang perlu diperhatikan adalah usaha untuk melakukan penurunan kemiskinan dan pelaksanaan program pembangunan negara untuk yang bertujuan untuk meningkatkan prestisenya. Upaya suatu negara dalam meningkatkan prestisenya terkadang bersinggungan dengan kepentingan negara lain, ataupun melibatkan negara lain namun tidak sampai menimbulkan pertentangan dengan nilai dan kepentingan inti dari negara lain.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid, hal 182.

### 3. *Self-Extention*

Suatu negara memiliki upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Akan tetapi, setiap negara tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, suatu negara harus melakukan *self-extention* dimana hal tersebut merupakan usaha dari suatu negara untuk melakukan perpanjangan diri dengan melakukan ekspansi dalam memenuhi kebutuhannya. Negara dibagi menjadi dua secara umum, yaitu negara *underdeveloped* dan negara *industrialized*.<sup>75</sup> Keduanya memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari kepemilikan komoditinya. Namun, masing-masing dari negara tersebut dapat saling melengkapi ketika dibentuknya kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Di satu sisi, negara berkembang dapat meningkatkan kemampuan industri dan alih teknologi serta meminimalisir tingkat pengangguran yang ada di negaranya. Sementara itu, negara maju memenuhi kebutuhannya berupa pasokan sumber daya bagi perkembangan industrinya.<sup>76</sup> Dapat diartikan bahwa dengan melakukan kerjasama, suatu negara melakukan perpanjangan tangan kepada negara lain dan mempertahankan pengaruhnya demi mencapai tujuan negaranya. Holsti menyebutkan penyebaran nilai komunis Tiongkok pada masa perang dingin merupakan satu contoh negara melakukan *self-extention*

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

yaitu perpanjangan diri secara regional yang mana merupakan kepentingan nasional dari Tiongkok pada masa itu, terlampaui dari kepentingan ekonomi dan strategi.<sup>77</sup>

### 2.2.1.3 Tujuan Jangka Panjang (*Long Range Goals*)

Tujuan jangka panjang lebih mengarah kepada tujuan yang bersisikan visi, harapan, dan pandangan baru tentang ketertiban dunia dalam sistem internasional. Kepentingan ini dapat dikatakan memiliki sifat yang abstrak dan memerlukan waktu yang sangat panjang ataupun tidak memiliki batasan waktu dalam proses pencapaiannya.<sup>78</sup> Kepentingan ini juga sering diartikan sebagai kepentingan yang sangat ideal dan abstrak, dimana hal tersebut ditandai dengan munculnya perencanaan akan masa mendatang dimana adanya pengaturan sistem internasional yang didasarkan atas ideologi tertentu yang lebih baik daripada periode sebelumnya.<sup>79</sup> Kepentingan ini cenderung didorong oleh idealisme dan sebuah semangat yang didasari oleh sebuah nilai yang menyebabkan kepentingan tersebut berorientasi pada peran negara dalam sebuah sistem internasional.

Tujuan inilah yang akan memengaruhi orientasi tindakan suatu negara sebagai sebuah kepentingan nasional nantinya. Namun, Holsti

---

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid.

mengakui bahwa terkadang orientasi suatu negara tidak memiliki hubungan dengan tujuan jangka pendek suatu negara. Walaupun demikian, tujuan jangka panjang merupakan sesuatu yang penting bagi negara apabila kebutuhan inti sudah terpenuhi dan juga kebutuhan menengahnya telah terlaksanakan. Sebagai contoh, Holsti menulis tentang bagaimana negara akan menggunakan ideologinya dan “*way of life*”-nya dalam melakukan hubungan luar negeri, namun di satu waktu negara mengacuhkan nilai-nilai tersebut apabila ada sesuatu hal lain yang ingin dicapainya ataupun hal lain yang harus dikompromikan.<sup>80</sup>

### 2.3 Operasionalisasi Konsep

Jika dilihat dari penjabaran konsep Kepentingan Nasional oleh Holsti, terdapat tiga variabel yang dapat menjelaskan soal kepentingan nasional suatu negara. Variabel tersebut adalah kepentingan dan nilai inti (*core value*), tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Ketiga variabel tersebut memiliki hubungan relasi secara hirarki dimana masing-masing variabel memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Holsti menjabarkan kepentingan tersebut sebagai sebuah piramida yang masing-masing tingkatannya menunjukkan batasan dan seberapa besar kepentingan suatu negara berdasarkan variabelnya. Batasan tersebut merupakan penggambaran oleh Holsti guna melihat sebuah kepentingan secara lebih sederhana. Berikut merupakan visualisasi yang digunakan:

---

<sup>80</sup> Ibid, hal 194.

Gambar 1. Tingkat Variabel Kepentingan.



Keberadaan nilai inti berada di bagian bawah dari piramid tersebut, hal ini dikarenakan nilai inti merupakan kepentingan dasar dari sebuah negara dalam menentukan sebuah keputusan. Nilai ini memiliki unsur waktu pencapaian yang pendek serta unsur waktu pemeliharaan yang bersifat berkelanjutan.<sup>81</sup> Dapat disimpulkan bahwa suatu negara akan memprioritaskan nilai inti dan kepentingannya dalam politik luar negeri atau menjaga kepentingan dan nilai utama tersebut sebelum beranjak pada kepentingan politik lainnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan negara dalam melakukan *self-preservation* atau pemeliharaan diri yang bersifat berkelanjutan atau bersifat seterusnya dan tidak pernah habis.

Di peringkat ke-dua dalam piramid tersebut adalah tujuan jangka menengah dimana kepentingan ini ada ketika nilai inti dari negara tersebut telah terpenuhi atau

---

<sup>81</sup> Ibid.

terkendali.<sup>82</sup> Tujuan jangka menengah ini merupakan tujuan yang cenderung dipengaruhi oleh kondisi geografis dan strategi diplomasi karena dalam pemenuhan kebutuhannya, sebuah unit politik memutuskan unit politik lain dalam memenuhi tujuannya. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan ini lebih mengarah pada keadaan dimana suatu unit politik melakukan kerjasama dengan unit lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kunci dalam tujuang jangka panjang merupakan interaksi saling membutuhkan antara suatu negara dengan negara lainnya. Perbedaan yang mendasar antara nilai inti dan kebutuhan jangka menengah berada dalam nilai dan kepentingannya. Nilai di kepenentingan inti memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan kepentingan janka menengah, dimana nilai inti berbicara soal kedaulatan dan keberlangsungan negara tersebut sedangkan kepentingan jangka menengah mengarah pada kesempatan ekonomi tercipta.<sup>83</sup> Dalam ruang waktu, nilai inti memiliki janga waktu yang cukup pedek dan bersifat berkelanjutan sedangkan tujuan jangka menengah memiliki jangka waktu menengah dan bersifat terbatas.<sup>84</sup> Holsti mengatakan bahwa unit politik tersebut cenderung menghindari adanya konflik demi mengutamakan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Tujuan jangka menengah tersebut kemudian dibagi menjadi tiga jenis yang dibagi berdasarkan interaksi dan tujuan yang lebih spesifik.

Tujuan Jangka Panjang merupakan sebuah tujuan yang bersifat abstrak. Holsti dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan jangka panjang ini merujuk pada

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid, 177-179

<sup>84</sup> Ibid.

pandangan mengenai kaidah suatu hal atau kaidah politik dalam sistem internasional, dan aturan-aturan yang mengarahkan hubungan kepada sistem serta peranan negara dalam sistem tersebut. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang penting dimiliki oleh suatu negara karena setelah dua variabel kepentingan sebelumnya terpenuhi, suatu negara akan memiliki peranan dalam sistem internasional.<sup>85</sup> Jadi dalam penelitian apabila kepentingan dan nilai inti serta kepentingan jangka menengah telah ditemukan oleh peneliti dan telah tercapai atau telah dikendalikan oleh negara maka kemungkinan besar, sikap atau tindakan negara akan bercermin pada visi dan misi atau tujuan negara sebelumnya, yang pada akhirnya memberikan peran kepada negara tersebut dalam sistem internasional. Hal yang membedakan antara tujuan ini dengan tujuan jangka menengah ialah, tujuan menengah memberikan batasan waktu dan tuntutan yang ditujukan pada negara lain, sedangkan tujuan jangka panjang memberikan tujuan yang universal dan ditujukan pada setiap negara dalam sistem dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Korelasi konsep kepentingan nasional menurut Holsti dalam tulisan ini, lebih mengarah pada penjelasan mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Filipina ketika mereka memutuskan untuk bergabung dalam membangun proyek infrastruktur dengan Tiongkok. Jika dilihat dari permasalahan yang diangkat, hal tersebut merupakan bentuk dari upaya Filipina dalam membangun kebutuhan infrastruktur di negaranya dalam bentuk bantuan luar negeri. Secara umum, tujuan dari bergabungnya Filipina dalam proyek OBOR merupakan keputusan yang syarat akan kepentingan

---

<sup>85</sup> Ibid.

ekonomi. Hal ini membuat keputusan yang dilakukan oleh Filipina merupakan sebuah langkah yang pada akhirnya memberikan peluang bagi perekonomian negaranya.

Jika dilihat dari pengertian Holsti tentang kepentingan jangka pendek, kepentingan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjamin keberlangsungan sistem politik ataupun kedaulatan negaranya, baik itu pengaruhnya secara domestik ataupun dalam sistem regionalnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Filipina merupakan keputusan untuk memulihkan statusnya dalam ranah politik yang terjadi di regionalnya khususnya Asia Tenggara. Ketika Filipina pada tahun 2016 memiliki hubungan yang kurang baik dengan Amerika, maka keberadaan negaranya dalam kondisi politik regional mengalami penurunan dari kondisi sebelumnya. Kebutuhan tersebut dapat dijelaskan dengan kerjasama untuk membangun kembali posisinya dalam sistem internasional dan memilih Tiongkok sebagai negara untuk bekerjasama. Dalam bukunya, Holsti menyebutkan bahwa nilai inti dari negara merupakan kepentingan yang muncul untuk mempertahankan kedaulatan dan merupakan sebuah keputusan krusial yang didahulukan sebelum mencoba mencapai kepentingan lainnya. Sebagai negara berkembang dan negara yang membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk membangun negaranya, Filipina memberikan peluang bagi negaranya untuk mengembangkan perekonomiannya seiring dengan bertambahnya fasilitas dalam bidang infrastruktur. Dengan mengacu pada kebutuhan tersebut, penulis menganggap

bahwa ada nilai inti dari terbentuknya kerjasama ini dapat dilihat dari kebutuhan krusial dalam membangun Filipina untuk menjadi lebih maju.

Untuk kepentingan jangka menengah, penulis melihat bahwa terdapat kebutuhan Filipina dalam membangun perekonomian negaranya dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya bagi Filipina untuk menyediakan kebutuhan dari negaranya demi mencapai perkembangan ekonomi yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan, kepentingan jangka menengah dapat dibagi lagi menjadi tiga aspek utama yaitu: *Economic Development Opportunities*, *The Increase of State's Prestige in The System*, dan *Self-Extention*.

Pertama merupakan *Economic Development Opportunities* merupakan peluang ekonomi muncul ketika suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama untuk membuka jalan agar negaranya mendapatkan peluang untuk meningkatkan perekonominya. Dalam hal ini, ketika Filipina memutuskan bekerjasama dengan Tiongkok, maka hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak berupa terbukanya peluang ekonomi bagi Filipina. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator mengenai seberapa besar peningkatan bantuan luar negeri yang didapatkan oleh Filipina sebagai negara berkembang. Ketika bantuan luar negeri Filipina meningkat, berarti terjadi peningkatan peluang secara ekonomi yang tercipta dari kerjasama tersebut. Dilihat dari kerjasama Filipina dan Tiongkok dalam hal pembangunan infrastruktur, indikator lainnya yang dapat dilihat merupakan kemudahan Filipina dalam mengakses pasar yang diciptakan dari kerjasama ini.

Berhubung kerjasama ini berfokus pada kegiatan pembangunan berupa pemberian bantuan luar negeri, penulis tidak terlalu menyinggung soal kegiatan ekspor-impor yang dijelaskan oleh Holsti sebagai salah satu indikator dalam variabel ini. Selain kedua hal tersebut, peningkatan yang terjadi dalam alih teknologi dan kemampuan Filipina dalam mengatasi keterbatasan sumber daya domestiknya.

Peningkatan prestise (*Increase Prestige*) di sini memiliki indikator yang berfokus pada pengembangan ekonomi Filipina, dengan mengesampingkan sektor militer. Walaupun dalam bukunya prestis erat kaitannya dengan kepemilikan kekuatan material seperti kapabilitas militer ataupun kemajuan teknologi, pada perkembangannya, nilai seperti tingkat ekonomi juga dapat dilihat sebagai prestis suatu negara. Hal tersebut penulis lakukan karena melihat kerjasama yang dilakukan oleh Filipina dan Tiongkok yang lebih berfokus pada sektor pembangunan infrastruktur ekonomi. Selain ekonomi, prestis juga dapat diukur melalui peningkatan sektor industri dan teknologi. OBOR yang merupakan salah satu program pembangunan berskala besar dapat dijadikan sebuah upaya untuk meningkatkan prestise dari Filipina dalam kepentingannya mengurangi kemiskinan dan peningkatan teknologi yang dicapai.

Kepentingan jangka menengah sebagai *Self-Extention* yang dilakukan dalam kerjasama Filipina-Tiongkok dapat dilihat dengan menggunakan indikator yang berfokus pada kepemilikan sumber daya baik dari Filipina maupun Tiongkok. Seperti yang dijelaskan oleh Holsti dalam bukunya, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan diperlukan negara lain untuk saling melengkapi kekurangan

tersbut. Ketika kerjasama OBOR dilakukan, maka terdapat timbal balik yang diberikan masing-masing negara sehingga kerjasama tersebut menguntungkan satu sama lainnya. Dengan demikian, kerjasama tersebut memiliki tujuan yang bersifat saling menguntungkan dan secara tidak langsung akan memberikan perpanjangan tangan ke negara tersebut demi mempertahankan pengaruhnya. Jika dilihat dalam pembagian negara menjadi *underdeveloped* dan *industrialized*, kita dapat membagi tipe apa yang dimiliki oleh Filipina dan Tiongkok. Pembagian tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai indikator yang mengelompokkan kebutuhan negara berdasarkan tipe tersebut. Hal ini akan memudahkan penulis ketika melihat hubungan timbal balik yang diberikan melalui kerjasama ini baik kepada Filipina ataupun Tiongkok.

Kepentingan jangka panjang merupakan kepentingan yang mengacu pada visi dan harapan suatu negara. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan keinginan Filipina untuk menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masuknya Filipina ke dalam proyek OBOR sejalan dengan visi yang dimiliki oleh Filipina dalam rencana pembangunan negara dengan meningkatkan sektor infrastruktur yang dimilikinya saat ini. Dengan demikian, peningkatan baik itu secara ekonomi maupun hubungannya terhadap peningkatan negara akan lebih mudah tercapai. Kepentingan jangka panjang ini juga dapat dilihat dari usaha Filipina untuk menjadikan dirinya sebagai bagian dari tatanan internasional regionalnya, melihat OBOR yang merupakan kerjasama ekonomi regional, maka dengan kerjasama yang

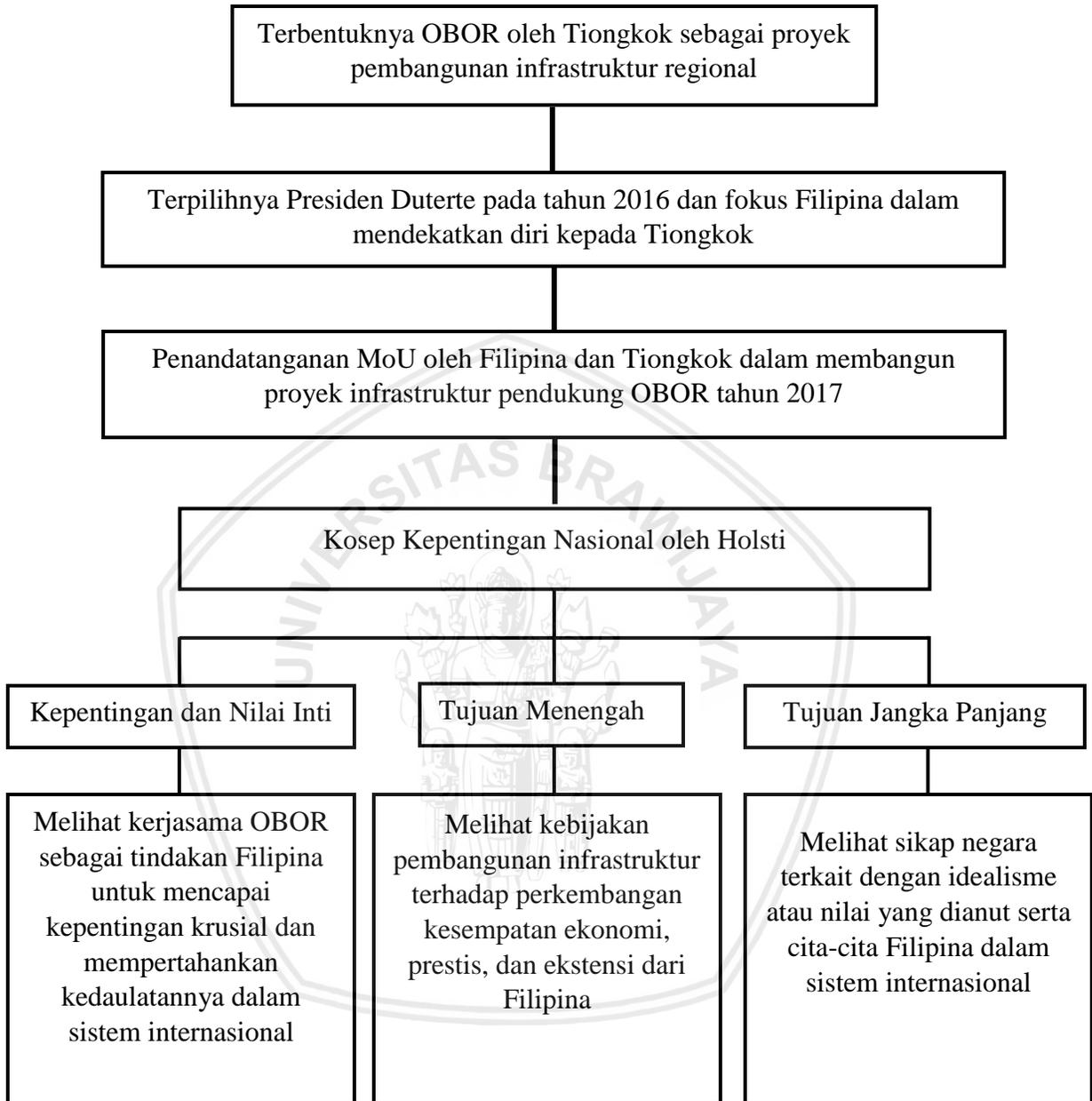
dilakukan oleh Filipina menjadikannya bagian dari perkembangan ekonomi di sistem internasional tersebut.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Kepentingan Nasional oleh K. J. Holsti	Kepentingan dan Nilai Inti	Upaya Filipina melakukan <i>Self-Preservation</i> untuk menjaga kedaulatan dan nilai strategis negaranya.	Melihat tujuan dan target Filipina dan pengaruhnya terhadap nilai strategis yang diciptakan oleh kerjasama OBOR
		<i>Economic Development Opportunities</i>	Melihat peningkatan pembangunan di Filipina melalui kerjasama OBOR
	Tujuan Jangka Menengah	<i>The increase of State's Prestige in the System</i>	Melihat dinamika perkembangan pembangunan infrastruktur di Filipina  Melihat perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pembangunan

			<p>Infrastruktur</p> <p>Melihat angka penyerapan tenaga kerja di Filipina</p>
		<i>Self-Extention</i>	<p>Melihat hubungan Filipina dan Tiongkok dalam hal bantuan luar negeri beberapa tahun terakhir serta hubungan timbal balik yang diberikan dari kebijakan OBOR</p>
	Tujuan Jangka Panjang	Idealisme dan Visi Negara	<p>Melihat cita-cita Filipina untuk mengembangkan infrastruktur dan hubungannya terhadap kerjasama OBOR sebagai pembangunan infrastruktur regional.</p>

## 2.4 Alur Pemikiran



## 2.5 Argumen Utama

Argumen utama yang penulis gunakan dalam konsep Kepentingan Nasional oleh Holsti dalam penandatanganan proyek pembangunan infrastruktur OBOR oleh Filipina dan Tiongkok merupakan kepentingan yang inti yang dimiliki oleh Filipina dalam melihat kerjasama ini sebagai bentuk *Self-Preservation* dalam bidang ekonomi untuk menjamin kelangsungan negaranya. Untuk tujuan jangka menengah, keputusan yang dibuat oleh Filipina merupakan usahanya dalam menjaga hubungan politik dan ekonomi dengan Tiongkok, walaupun terdapat ketidaksepakatan mengenai wilayah yang dilalui oleh OBOR, tetapi Filipina melihat bahwa dengan terbentuknya kerjasama tersebut maka terdapat potensi untuk meningkatkan perekonomiannya dibandingkan jika Filipina tidak menyetujui kerjasama tersebut. Terakhir merupakan tujuan jangka panjang dimana Filipina membuat kerjasama tersebut berdasarkan keinginannya dalam mengembangkan infrastruktur dan menjadikan negaranya sebagai bagian dalam proses pembangunan ekonomi regional dalam hal infrastruktur.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang menjelaskan tentang sebuah isu dengan menggunakan konsep Kepentingan Nasional dengan penyajian data secara kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut, maka penulis akan menjelaskan permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulis akan menggambarkan secara rinci dan aktual yang terjadi yang dilihat dari gejala-gejala dan realita yang ada dalam ranah penelitian tersebut. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan Kepentingan Nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam keputusannya untuk bergabung dalam kerjasama *One Belt One Road* yang di dicituskan oleh Tiongkok dan korelasinya terhadap kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam lingkup interaksi antara Tiongkok dan Filipina serta aktor-aktor sekitarnya yang dapat memengaruhi keputusan Filipina bergabung di proyek OBOR. Penelitian ini berfokus pada jangka waktu 2017 dimana dalam waktu tersebut terdapat faktor yang menjelaskan kepentingan nasional Filipina dalam kesediaannya untuk bergabung ke dalam proyek OBOR. Tiongkok sebagai

negara yang memiliki hubungan langsung dalam kerjasama ini juga perlu dimasukkan untuk melihat dampak dari kerjasama ini terhadap Filipina.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini. Data secara kualitatif dijelaskan sebagai informasi empiris yang tidak selalu berbentuk angka terhadap lingkup penelitian yang dilakukan.<sup>86</sup> Data dari penelitian kualitatif sendiri terdiri dari transkrip, dokumen, *audio-visual* material, dan jurnal. studi literatur dengan menggunakan referensi buku, jurnal dan informasi yang bersifat *online* ataupun literasi terkait dengan bentuk kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam penandatanganan proyek OBOR.<sup>87</sup> Dengan menggunakan konsep Kepentingan Nasional oleh K. J. Holsti untuk mengidentifikasi kepentingan nasional yang dibagi menjadi tiga macam kepentingan yaitu kepentingan dan nilai inti, kepentingan jangka menengah, dan kepentingan jangka panjang.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa data kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data secara komprehensif dalam mengarahkan penulis dalam menentukan hubungan stabil antar fenomena.<sup>88</sup> Penulis menerapkan analisa data dengan menggunakan tiga komponen, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Drawing and Verifying Conclusion*.<sup>89</sup> Data reduction merupakan

---

<sup>86</sup> Keith F Punch, *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (2<sup>nd</sup> ed), hal 56.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>88</sup> *Loc., Cit*, Keith F Punch, hal 197.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 198.

analisa dimana data yang penulis dapatkan akan di-*edit*, dikelompokkan dan disimpulkan; dan selanjutnya menemukan pola dan tema dalam data tersebut.<sup>90</sup> *Data Display* dimana penulis menata, memadatkan dan merangkai informasi yang ada untuk mempermudah dalam membaca data yang ada.<sup>91</sup> Terakhir yaitu *Drawing and Verifying Conclusion* dimana data yang telah didapatkan dan diolah melalui langkah sebelumnya, akan dirangkai menggunakan logika dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut.<sup>92</sup> Data di sini diambil dari beberapa kasus, artikel yang dimuat di media, maupun pernyataan yang berhubungan langsung dengan proyek OBOR oleh Tiongkok dan pengaruhnya terhadap kepentingan nasional Filipina dalam keputusannya bergabung dengan proyek OBOR. Setelah memperoleh data-data tersebut, penulis kemudian memproses dan menganalisis informasi yang ada sehingga didapatkan sebuah kesimpulan baru terkait dengan tulisan ini. Data tersebut berupa dokumen, *statement*, *blueprint*, ataupun kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Penulis menggunakan analisa dalam bentuk *Multiple Causation* dan menghasilkan *Single Effect*.<sup>93</sup> Dengan menggunakan analisa dalam bentuk ini, Penulis menjelaskan bagaimana Filipina yang dipengaruhi banyak faktor kepentingan yang akhirnya merealisasikan kepentingan tersebut dengan tindakannya untuk bergabung ke dalam proyek *One Belt One Road*.

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid, hal 199.

<sup>93</sup> Ibid, hal 52.

### 3.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan secara sistematis dan terperinci kerangka yang akan penulis gunakan. Skripsi ini akan dikelompokkan dalam enam Bab yang akan menjelaskan tulisan ini dengan lebih terstruktur. Berikut merupakan kerangka yang penulis gunakan:

**BAB I PENDAHULUAN** berisikan garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat yang diperoleh mahasiswa, fakultas, dan universitas melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bagaimana Filipina dan Tiongkok yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik satu sama lain sampai akhirnya Filipina mengesampingkan hal tersebut dan menandatangani persetujuan pembangunan proyek infrastruktur OBOR sebagai bentuk kepentingan nasionalnya. Dalam BAB ini juga menjelaskan rumusan masalah yang penulis ungkapkan sebagai garis besar pemikiran utama agar fokus dari penelitian ini tidak berubah selama dilakukannya penelitian, analisis, hingga kesimpulan.

**BAB II KERANGKA PEMIKIRAN** berisikan kerangka pemikiran dan relevansi isu dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Terdapat Studi Terdahulu yang memberikan gambaran umum baik itu dalam hal isu ataupun konsep yang penulis gunakan guna memberikan kemudahan dalam menganalisis isu yang ada. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai konsep yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Kepentingan Nasional tersebut didefinisikan oleh K. J. Holsti. Bab ini juga berisikan gambaran umum konsep Kepentingan Nasional dan

relevansinya terhadap tindakan keputusan Filipina untuk masuk ke dalam OBOR sebagai bentuk dari kepentingan nasionalnya. Dengan relevansi tersebut, penulis memberikan argumen awal bagaimana hal tersebut berpengaruh satu sama lain. Penulis juga memberikan alur pemikiran dan operasionalisasi konsep yang membantu penulis dalam melihat isu ini dalam bentuk yang terstruktur sehingga mempermudah analisis di dalam pembahasan sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana isu ini akan diteliti dengan konsep yang ada.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** berisikan mengenai jenis penelitiannya yang dipilih, ruang lingkup penelitian sebagai fokus dalam mengkaji penelitian ini, teknik pengumpulan data, hingga interpretasi data yang relevan terhadap penelitian, serta penjelasan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menganalisis isu yang dibahas. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan isu yang ada dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat deskripsi mengenai apa yang akan penulis masukkan dalam Bab berikutnya sehingga dapat memberikan gambaran spesifik dalam menganalisa kasus ini.

**BAB IV PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA KONDISI EKONOMI DI FILIPINA DAN TIONGKOK** berisikan gambaran umum mengenai proyek OBOR oleh Tiongkok yang akan dijelaskan lebih mendalam serta instrumen yang digunakan dalam OBOR. Status hubungan antara Filipina dan Tiongkok khususnya kerjasama pengembangan infrastruktur dan bantuan luar negeri akan dibahas secara mendalam dengan mengikutsertakan interaksi-interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Posisi dari aktor tersebut juga akan dijelaskan

untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi kerjasama ekonomi dalam hal pembangunan infrastruktur memengaruhi kepentingan yang dimiliki oleh Filipina. Data-data yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi tulisan ini juga akan dijabarkan sehingga dapat mempermudah analisis yang akan dilakukan selanjutnya.

**BAB V KEPENTINGAN NASIONAL FILIPINA DALAM BERGABUNG PADA PROYEK ONE BELT ONE ROAD** berisikan tentang analisa penulis mengenai tulisan ini dengan memanfaatkan data-data yang telah terkumpul dan dijabarkan pada Bab sebelumnya melalui konsep yang telah penulis tentukan yaitu Konsep Kepentingan Nasional oleh Holsti. Analisa mengenai bagaimana bentuk dari kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina sehingga mereka menyetujui proyek pembangunan infrastruktur OBOR jika dilihat dari ketiga jenis kepentingan yang dibagi berdasarkan Nilai dan Unsur Waktu. Kepentingan tersebut antara lain Kepentingan dan Nilai Inti, Kepentingan Jangka Menengah, dan Kepentingan Jangka Panjang. Hal tersebut kemudian dijabarkan dengan melihat variabel serta indikator yang dapat menjelaskan masing-masing kepentingan serta relevansinya terhadap isu yang penulis angkat.

**BAB VI PENUTUP** berisikan penutup dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan penelitian yang telah penulis dapatkan dari latar belakang hingga hasil dari pembahasan itu sendiri. Penulis juga akan memberikan kontribusi dalam penelitian ini dalam bentuk saran maupun kritik yang dilihat dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA KONDISI EKONOMI DI FILIPINA DAN TIONGKOK

Dalam Bab ini, penulis akan menjabarkan gambaran umum tentang hubungan Filipina dan Tiongkok dalam dinamika bantuan luar negeri khususnya pembangunan infrastruktur. Bab ini juga memberikan bagaimana awal mula terbentuknya OBOR dan apa yang menjadi tujuan dari proyek ini sendiri. Dengan melihat hal tersebut, maka kondisi Filipina dari segi negara yang ikut serta dalam pembangunan infrastruktur ini dapat dijabarkan dan dapat dilihat secara lebih rinci. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Filipina merupakan negara yang memiliki kebutuhan yang cukup tinggi dalam pembangunan infrastruktur domestiknya dan keberadaan OBOR yang dapat memberikan hal tersebut sebagai salah satu dari program yang diberikan.

Kondisi Filipina dalam hal pembangunan infrastruktur dan kebutuhannya terhadap bantuan luar negeri kemudian membawa kepentingannya dalam bergabung pada proyek OBOR. Terlepas dari dinamika sengketa yang dialami oleh kedua negara, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari usaha Filipina dalam membangun negaranya.

#### 4.1 Proyek OBOR dalam Regional Asia

Tujuan dibentuknya kebijakan OBOR pada dasarnya berawal dari keinginan China dalam mengembangkan hubungan perekonomian yang lebih efisien dengan

negara lain. Dengan mengedepankan beberapa aspek yang disebut sebagai kebijakan yang saling menguntungkan satu sama lain. Beberapa aspek yang dipromosikan dalam kebijakan ini adalah meningkatkan hubungan yang terbuka melalui kerjasama dalam segala bidang, meningkatkan kepercayaan politik bersama, serta integrasi ekonomi dan kebudayaan bersama.<sup>94</sup>

Konsep kebijakan OBOR sendiri, pertama kali dicetuska oleh presiden Xi Jinping pada pidatonya di Universitas Nazabayev, Kazaksthan tahun 2013.<sup>95</sup> Pada saat itu, Xi Jinping pertama kali menyebutkan inisiatifnya untuk membuat jalur perdagangan ekonomi yang mencakup jalur darat dan laut yang menyambungkan benua Asia dengan Eropa. Bercermin pada kebijakan kerjasama yang hampir sama dengan skala yang lebih kecil, dimana jalur yang dibuat menyambungkan Tiongkok dengan Pakistan melalui rel kereta api yang dibangun pada tahun 2013.<sup>96</sup> Dalam pidatonya tersebut, Presiden Xi Jinping mengemukakan lima poin utama yang merujuk pada tujuan pembentukan OBOR sebagai jalur penghubung antara benua Asia dan Eropa. Pertama yaitu, memperkuat komunikasi kebijakan mengenai strategi pengembangan ekonomi; kedua, mengembangkan konektivitas transportasi antar negara; ketiga, mempromosikan fasilitas perdagangan; keempat, meningkatkan sirkulasi keuangan agar lebih kompetitif; dan yang kelima, yaitu memperkuat

---

<sup>94</sup> [http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content\\_281475080249035.htm](http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm)

<sup>95</sup> President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries, [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/topics\\_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh\\_665686/t1076334.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml), diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

<sup>96</sup> Ibid.

perpindahan manusia.<sup>97</sup> Hal tersebut menjadi poin penting dimana tujuan dibentuknya proyek ini tidak lain merupakan usaha Tiongkok melalui Presiden Xi Jinping dalam memperkuat kebutuhan ekonominya terutama dalam perpindahan barang dan relasinya dengan negara-negara yang dilewatinya. Penggunaan isu ekonomi sebagai dasar pembentukan proyek OBOR merupakan hal yang dianggap sebagai kepentingan primer Tiongkok yang mengedepankan kekuatan hubungan antar negara yang memberikan dampak yang saling menguntungkan. Dengan dicapainya poin-poin tersebut, Tiongkok menekankan bahwa proyek ini sendiri layak dilakukan dan dapat memperbaiki perekonomian Tiongkok dan negara-negara lainnya.

Kerjasama Tiongkok-Pakistan merupakan inspirasi awal terbentuknya proyek OBOR pada tahun 2014. Dari model awal ini, Tiongkok merencanakan untuk membangun dua jalur yang mencakupi jalur darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di Asia dan Eropa. Sebagai inspirasi dari proyek OBOR, pembentukan jalur yang lebih luas ini menjadi lebih terarah sehingga memberikan gambaran awal bagaimana proyek OBOR ini dilaksanakan. Proyek OBOR secara resmi diperkenalkan pada tahun 2014 dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional pada Konferensi *Central Economic Work*.<sup>98</sup>

Sebelumnya pada tahun 2013, Xi Jinping mengajukan untuk membentuk hubungan Tiongkok-ASEAN dan menawarkan arahan dalam membangun *21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road* untuk mempromosikan kerjasama maritime kepada

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Peter Cai. 2017. *Understanding Tiongkok's Belt and Road Initiative*. Lowy Institute, halaman 6.

negara ASEAN.<sup>99</sup> Tiongkok juga mengajukan pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk menangani pendanaan dari pembangunan infrastruktur serta meningkatkan interkoneksi regional dan integrasi ekonomi.<sup>100</sup> Dengan membentuk kerjasama dengan ASEAN, Tiongkok menunjukkan bahwa OBOR merupakan solusi dari pembangunan infrastruktur guna mengembangkan perekonomian di negara ASEAN. Pembentukan AIIB juga menjadikan manajemen keuangan dari OBOR lebih jelas dengan adanya kontrol yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Pada 2014, AIIB telah mendapatkan pengakuan oleh 22 negara di Asia yang bersedia masuk menjadi anggota dan menandatangani MoU untuk membentuk AIIB.<sup>101</sup> Tiongkok sendiri mengumumkan bahwa mereka akan mengkontribusikan dana sebanyak USD 40 Miliar untuk pembangunan OBOR.<sup>102</sup> Pendanaan tersebut digunakan untuk menyediakan investasi dan bantuan finansial pembangunan infrastruktur, sumber daya, kerjasama industrial, dan proyek lainnya terhadap negara yang berpartisipasi dalam OBOR.<sup>103</sup> Berikut merupakan *Timeline* dari proses pembentukan OBOR:

---

<sup>99</sup> Cronology of Tiongkok's Belt and Road Initiative, [http://english.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.htm](http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm), diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

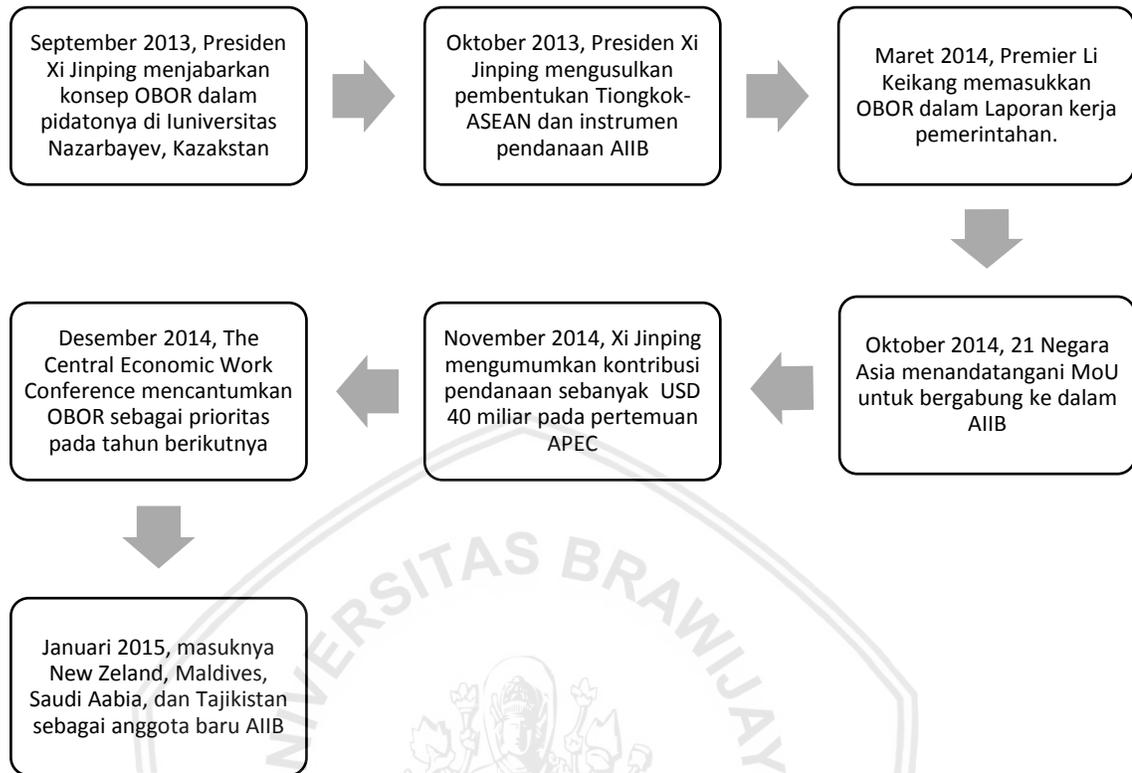
<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Ibid.

Gambar 2. *Timeline* Kejadian Penting OBOR



Sumber: Hasil olahan penulis dari [http://english.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.htm](http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm)

Untuk kawasan Asia, jalur OBOR yang mendominasi adalah *Maritime Silk Route* dimana kondisi geografi Asia sendiri didominasi oleh jalur laut. Dalam upayanya memasuki kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, Tiongkok melakukan beberapa pendekatan terhadap negara-negara prospek yang memiliki peluang untuk turut serta dalam mendukung proyek OBOR. Tiongkok melakukan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara tersebut untuk mempromisikan sekaligus mengajak mereka untuk turut serta menjadi bagian dari OBOR. Salah satu contohnya

adalah Indonesia dimana Tiongkok dan Indonesia menandatangani 28 kerjasama dengan nilai mencapai USD 91 Miliar.<sup>104</sup>

## 4.2 Filipina dan Bantuan Luar Negeri

Filipina yang merupakan negara anggota ASEAN merupakan negara berkembang dengan GDP sebesar USD 284.5 Miliar.<sup>105</sup> Dengan statusnya sebagai negara berkembang, Filipina memiliki kewajiban untuk membangun negaranya, salah satunya adalah pengembangan infrastruktur. Untuk melakukan hal tersebut, selain menggunakan dana internal negara dan privat, bantuan luar negeri juga dapat memberikan bantuan dana kepada Filipina guna meringankan beban dari pihak Filipina. Salah satu cara Filipina dalam mendanai proyeknya adalah dengan *Official Development Assistance* (ODA).<sup>106</sup> Hal ini memberikan peluang bagi negara ataupun instansi lain untuk menyalurkan dananya dalam pembangunan infrastruktur di Filipina. ODA yang sebelumnya dilakukan oleh Filipina didominasi oleh ODA dari *Asian Development Bank* (ADB) yang juga memiliki beberapa proyek yang dibangun di Filipina. Selain menggunakan ODA dari institusi multilateral, Filipina juga menerima ODA dari Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Korea melalui *Korea International Cooperation Agency* (KOICA), dan dari

---

<sup>104</sup> Bisnis 22 Maret 2019, <https://bali.bisnis.com/read/20190322/537/903186/proyek-obor-Tiongkok-diyakini-berdampak-positif-bagi-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019.

<sup>105</sup> World Bank, Philippines, <https://data.worldbank.org/country/philippines>, diakses pada 27 Juni 2019.

<sup>106</sup> UNESCAP, The Philippines-National Studies: Infrastructure Finacing Strategies for Sustainable Development, [https://www.unescap.org/sites/default/files/3-Philippines%20National%20Study\\_printer%20rev.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/3-Philippines%20National%20Study_printer%20rev.pdf), diakses pada 27 Juni 2019.

pemerintahan Tiongkok.<sup>107</sup> Sebagian besar dari ODA tersebut merupakan dana yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, bandara, jalan, dan jembatan.

Sebelum pemerintahan Duterte, pendanaan yang digunakan dalam proyek pembangunan khususnya di bidang infrastruktur didominasi dengan pendanaan publik dan privat melalui *Public-Private Partnership* (PPP) yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.<sup>108</sup> Setelah terpilihnya Duterte sebagai presiden dan melalui proses yang panjang, pendanaan proyek semakin diperluas dengan melibatkan ODA dari Tiongkok. Sebelumnya Filipina sama sekali tidak menerima ODA dari Tiongkok pada masa pemerintahan Aquino. Dapat dilihat dari tabel berikut yang memperlihatkan total dana yang diberikan melalui ODA dari beberapa negara pada tahun 2015.

---

<sup>107</sup> Export.gov, *Philippines-Infrastructure*, <https://www.export.gov/article?id=Philippines-Transport-Infrastructure>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

<sup>108</sup> Aurora Almendral, 5 September 2018, *Philippines Richest 2018: Billionaire Builders Push Ahead With Infrastructure Projects*, <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2018/09/05/philippines-richest-2018-billionaire-builders-push-ahead-with-infrastructure-projects/#748709fe70f4>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

Tabel 2. Total ODA Berdasarkan Kerjasama Pembangunan (dalam Juta USD).

Development Partner	Loan Amount	Grant Amount	Total ODA	% Share	Rank
GOJ-JICA	5,389.78	139.82	5,529.60	35.19	1
WB	3,384.46	75.61	3,460.07	22.02	2
ADB	3,167.28	112.16	3,279.44	20.87	3
USAID/MCC	-	1,268.29	1,268.29	8.07	4
Australia-DFAT	-	567.09	567.09	3.61	5
KEDCF/KOICA	427.94	87.61	515.55	3.28	6
UN System <sup>2</sup>	110.71	365.28	475.99	3.03	7
EU	-	227.31	227.31	1.45	8
GIZ/KfW	26.52	108.20	134.72	0.86	9
OFID	70.00	-	70.00	0.45	10
AFD	55.78	7.22	63.00	0.40	11
Canada-DFAT	-	61.30	61.30	0.39	12
Italy	28.71	5.61	34.32	0.22	13
NZAid	-	10.88	10.88	0.07	14
AECID	-	10.88	10.88	0.07	15
China	-	1.56	1.56	0.01	16
NoRad	-	1.43	1.43	0.01	17
TIKA	-	0.90	0.90	0.01	18
<b>Total</b>	<b>12,661.17</b>	<b>3,051.14</b>	<b>15,712.31</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: ODA portofolio report 2015 pada <http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/01/CY-2015-ODA-Portfolio-Review-Report.pdf>

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, pemerintah Filipina tidak menggunakan ODA dari Tiongkok. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kebijakan PPP yang digunakan oleh presiden Aquino dalam menyikapi kebutuhan pendanaan pembangunan Filipina. Hal ini juga disebabkan oleh program PPP itu sendiri yang menggunakan pendanaan melalui Publik-Privat yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pada akhirnya dalam masa pemerintahan Duterte, Filipina memutuskan menerima dana sebesar USD 11.7 Miliar pada tahun 2016.<sup>109</sup> Walaupun jumlahnya tidak sebesar ODA dari negara partner yang menjalin kerjasama lebih lama dengan

<sup>109</sup> Ibid.

Filipina, keberadaan Tiongkok sebagai pihak penyalur dana menimbulkan dinamika baru pada pembangunan negaranya. Dana tersebut merupakan bagian pendanaan proyek yang telah disepakati sebagai upaya pengembangan infrastruktur. Peningkatan ini merupakan sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa pada pemerintahan Duterte, hubungan antara Filipina dan Tiongkok semakin mengalami peningkatan dan hal ini menimbulkan dinamika baru dengan negara-negara yang telah menjadi partner Filipina dalam pemberian bantuan pembangunan.

Keputusan digunakannya ODA menunjukkan bahwa Filipina masih bergantung pada bantuan luar negeri dalam membangun proyek-proyek infrastruktur tersebut. Dalam perkembangannya, Filipina menggunakan ODA dari Tiongkok untuk mengembangkan proyek utama pengembangan infrastruktur pasca kerjasamanya dengan Tiongkok. ODA tersebut digunakan untuk menandai sejumlah proyek dengan jumlah mencapai USD 11,693 Juta dalam bentuk pinjaman ataupun bantuan pada tahun 2017.<sup>110</sup> Setelah menjadi anggota resmi dari AIIB, Filipina menggunakan dana AIIB untuk membangun infrastruktur yang merupakan salah satu dari syarat peminjaman dana melalui AIIB. Dana tersebut merupakan dana untuk membangun infrastruktur yang memiliki korelasi serta manfaat yang akan diberikan kepada proyek OBOR nantinya, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>110</sup> Ibid, hal 22.

Tabel 3. Proyek dengan Dana ODA Tiongkok

Name of Project	Financing Mode	Project Cost (\$ million)
1. Chico River Pump Irrigation Project	Loan	53.71
2. New Centennial Water Source – Kaliwa Dam Project	Loan	373.03
3. North-South Railway Project – South Line (Long Haul)	Loan	2368.81
4. Mindanao Railway Project	Loan	628.45
5. Subic-Clark Railway Project	Loan	637.53
6. BGC – NAIA segment of the Metro Manila BRT – EDSA Project	Loan	298.84
7. Detailed Engineering & Construction of Two Bridges across Pasig River	Grant	61.09
8. Davao City Expressway Project	Grant	488.11
9. Panay-Guimaras-Negros Island Bridges (F/S)	Grant	541.04
10. Cebu-Bohol Link Bridge (F/S)	Grant	1,128.01
11. North Luzon Expressway East Project (F/S)	Grant	888.75
12. Dinagat (Leyte) – Surigao Link Bridge (F/S)	Grant	943.43
13. Luzon – Samar Link Bridge (F/S)	Grant	1,148.52
14. Bohol-Leyte Link Bridge	Grant	1,435.66
15. Negros-Cebu Link Bridge (F/S)	Grant	287.13
16. Pasacao-Balatan Tourism Coastal Development Program (F/S)	Grant	94.43
17. Camarines Sur Expressway Project (F/S)	Grant	44.85
18. Ambal Simuay Sub-Basin of the Mindanao River Basin Flood Control and River Protection Project (F/S)	Grant	272.10
<b>TOTAL</b>		<b>11,693.48</b>

Sumber: The Philippines-National Study: Infrastructure Financing Strategies for Sustaining Development, hal 22.

#### 4.3 Program *Build, Build, Build* (BBB) dalam Masa Pemerintahan Duterte

Filipina merupakan negara dengan kebutuhan pembangunan yang cukup tinggi di Asia.<sup>111</sup> Hal tersebut dikarenakan kekurangan dalam hal infrastruktur dan menyebabkan banyak masalah bagi perkembangan ekonomi Filipina seperti masalah

111

kemiskinan dan pengangguran.<sup>112</sup> Dalam laporan mengenai pembangunan infrastruktur di Filipina, seorang akademisi yaitu Richard Javad Heydarian mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.<sup>113</sup> Masalah tersebut dalam pemerintahan Duterte kemudian diatasi dengan membuat sebuah program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur Filipina.

Proyek BBB merupakan sebuah upaya yang dilakukan Duterte dalam menggambarkan sikapnya tentang perkembangan Filipina khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Selain meningkatkan kapabilitas Filipina dalam hal infrastruktur, hal tersebut juga diharapkan dapat mengatsasi masalah yang muncul seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam pemerintahannya, target pembangunan infrastruktur yang digunakan mencapai USD 180 Miliar dimana hal tersebut tercantum pada program BBB sampai tahun 2022.<sup>114</sup> Proyek utama dari BBB sendiri termasuk *Subic-Clark Railway*; *North-South railway project* yang menghubungkan Los Banos, Laguna ke Tutuban, serta Manila dan Clark Freeport di Pampanga; 1,500 hektar Industrial park di Clark, Pampanga; dan perluasan Bandara Internasional yang juga ada di Pampanga.<sup>115</sup>

Keberadaan program baru ini tidak luput dari penadangan Duterte terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam

---

<sup>112</sup> Sara Mae D. M, *Understanding the 'Build, Build, Build' Program*, <https://business.inquirer.net/254682/understanding-build-build-build-program>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Export.gov, Op.Cit.

<sup>115</sup> Sara Mae D. M, Op.Cit.

laporan mengenai strategi pembangunan Filipina tahun 2017-2022, penggunaan PPP dianggap tidak maksimal dikarenakan adanya beberapa proyek yang tertunda dikarenakan pendanaan yang kurang maksimal. Dengan melihat hal tersebut, Duterte kemudia memperluas pendanaan tersebut dengan menggunakan bantuan luar negeri yang sebelumnya tidak digunakan secara penuh dalam pembangunan infrastruktur di Filipina. Dapat dilihat dalam grafik di bawah, terdapat peningkatan dana infrastruktur yang digunakan dalam pembangunan di Filipina dibandingkan dengan tahun sebelum presiden Duterte terpilih. Sebelumnya juga dikatakan pengembangan infrastruktur di Filipina kurang efektif jika dilihat pada tahun 2012 dan 2014, target dan pencapaian memiliki gap yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya beberapa proyek pembangunan di Filipina.<sup>116</sup> Hal ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi yang dihadapi oleh Filipina ketika infrastruktur tersebut tidak terrealisasi pada waktu yang telah ditentukan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Philippines Development Plan, <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/phi169293.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019

<sup>117</sup> Ibid.

Gambar 3. Pengeluaran Infrastruktur Filipina 2011-2016



Sumber: Philippines Development Plan 2017-2022, <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/phi169293.pdf>

## BAB V

### KEPENTINGAN NASIONAL FILIPINA DALAM BERGABUNG PADA PROYEK ONE BELT ONE ROAD

Pada Bab ini penulis berisi analisa yang menjabarkan kepentingan nasional dari Filipina yang memengaruhi keputusan Filipina dalam bergabung pada proyek pembangunan infrastruktur OBOR melalui penandatanganan MoU perihal pembangunan infrastruktur dan penerimaan *Official Development Assistance* oleh Tiongkok. Hal tersebut akan dianalisis berdasarkan kebijakan ODA sebelumnya yang sama sekali tidak memasukkan Tiongkok sebagai bagian dari pendanaan yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan di Filipina. Kepentingan tersebut kemudian diidentifikasi menggunakan variabel yang telah penulis jabarkan sebelumnya dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan pada Bab sebelumnya.

#### 5.1 Kepentingan dan Nilai “Inti” Filipina

Seperti yang telah kita ketahui, kepentingan ini merupakan kepentingan yang paling dasar bagi suatu negara yang bertujuan untuk mengamankan kedaulatan atau keamanan negaranya.<sup>118</sup> Untuk melihat hal tersebut, kita perlu melihat apa sebenarnya yang menjadi faktor pemicu yang dapat mengancam keberadaan Filipina dalam hal kedaulatan maupun nilai strategis yang dimiliki sehingga membuat Filipina menerima proyek OBOR tersebut. Nilai inti yang disebutkan oleh Holsti merupakan

---

<sup>118</sup> K. J. Holsti, Op.Cit., hal 177.

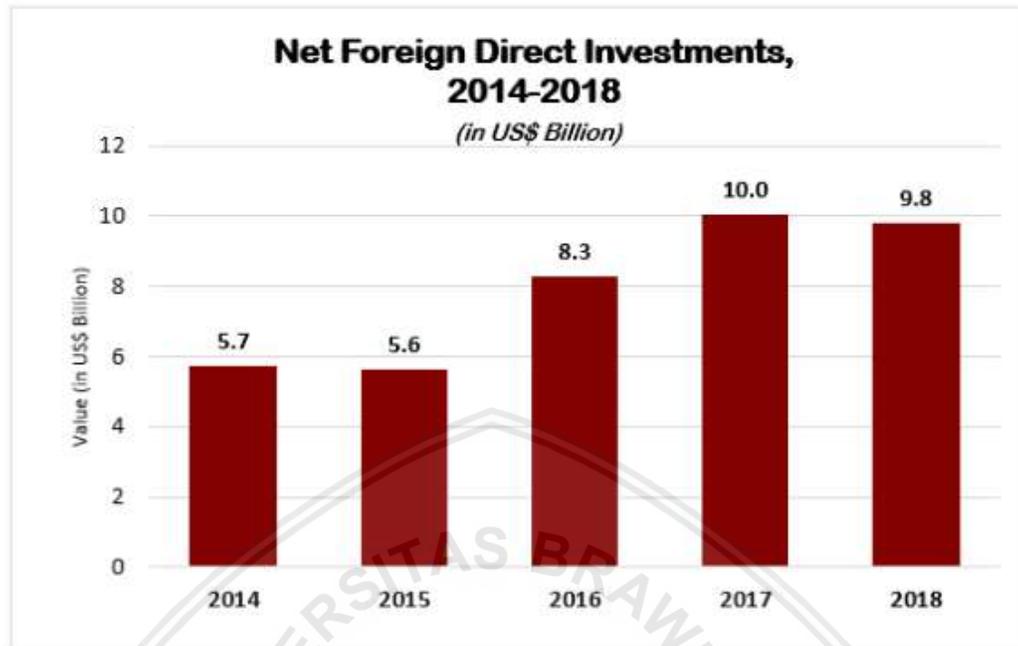
bagian dari *Self-Preservation* atau pemeliharaan diri yang bertujuan untuk menjaga eksistensinya sebagai suatu unit politik dalam bidang sosial ekonomi dan politik.<sup>119</sup> Jika dihubungkan dengan operasionalisasi konsep pada bab sebelumnya, kepentingan nasional dari Filipina merupakan upaya negaranya dalam menjaga eksistensinya sebagai bagian dari perkembangan nilai strategis yang diciptakan dari terbentuknya OBOR tersebut.

Nilai strategis yang ingin dipertahankan oleh Filipina sendiri merupakan bagian dari upayanya melakukan *Self-Preservation* dalam hal kepentingan ekonomi dalam hal ini bagaimana cara Filipina mendapatkan investasi ke negaranya. Dapat dilihat pada tabel di bawah dimana FDI dari Filipina pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, Filipina mendapatkan sekitar USD 5.6 Miliar dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya yang mencapai USD 8.3 Miliar. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan BBB oleh presiden terpilih pada saat itu. Kenaikan tersebut kontras dengan pemerintahan sebelumnya, karena pada pemerintahan Antonia Aquino III FDI bukan menjadi pilihan utama dalam mendanai pembangunan di negaranya. Berbeda dengan program BBB yang memperluas pendanaan proyek infrastruktur dengan menggunakan dana FDI sebagai salah satu sumber pendanaan, terlebih lagi dengan memasukkan Tiongkok sebagai salah satu penyedia dana yang sebelumnya sama sekali tidak ikut serta dalam menyediakan FDI bagi Filipina.

---

<sup>119</sup> Ibid.

Bagan 1. FDI Filipina tahun 2014-2018



Sumber: *Department of Trade and Industry Filipina*,  
<https://www.dti.gov.ph/resources/statistics/net-foreign-direct-investments-fdi#graph>

Bertambahnya FDI untuk mendanai proyek pembangunan sendiri merupakan salah satu bentuk *Self-Preservation* yang dilakukan oleh Filipina dalam mengamankan nilai strategis dari pengembangan ekonominya. Dengan menggunakan FDI yang kontras dari sebelumnya hanya menggunakan pendanaan Publik-Privat, Filipina menandakan bahwa bantuan luar negeri merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuannya dalam melakukan pembangunan dalam negeri. Jika melihat pengertian Holsti mengenai nilai inti menjelaskan bahwa untuk mencapai kepentingan ini sebuah negara memiliki tendensi terhadap peningkatan akses sumber daya yang lebih besar.<sup>120</sup> Sebagai salah satu sumber pendanaan terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan Filipina, FDI merupakan sebuah sumber daya yang

<sup>120</sup> K. J. Holsti, Op.Cit., hal 177.

memberikan akses terhadap pengembangan negaranya dalam hal infrastruktur. Hal tersebut merupakan salah satu dari MoU yang telah ditandatangani oleh pihak Filipina dan Tiongkok guna membentuk infrastruktur-infrastruktur baru yang mendukung realisasi proyek OBOR sendiri.

Merujuk pada kepentingan nasional suatu negara yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan ruang waktu dan nilai pada suatu keputusan, maka kita dapat melihat kepentingan bergabungnya Filipina dalam Proyek OBOR. Untuk kepentingan dan nilai inti sendiri, memiliki ruang waktu yang berkelanjutan yang jika dikaitkan dengan keputusan Filipina, maka hal ini merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menjamin kedaulatan negaranya dalam hal ini, relevansi ekonomi strategis dalam proyek OBOR. Untuk OBOR sendiri memiliki potensi dalam hal koneksi yang menghubungkan antara Tiongkok dengan negara-negara yang dilewatinya termasuk negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Filipina sendiri merupakan negara yang dilewati jalur OBOR khususnya jalur *Maritime Silk Road*. Dapat dibayangkan, ketika Filipina menerima proyek ini sebagai bagian tujuannya membangun infrastruktur dalam negeri, potensi-potensi yang akan muncul seperti bantuan luar negeri ataupun investasi-investasi akan semakin banyak dan hal tersebut akan membantu tujuan dari Filipina itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa ketika Filipina menandatangani MoU dengan Tiongkok, maka Filipina akan mendapatkan jaminan bahwa akses pasar yang terbentuk tidak akan dibatasi mereka setuju dengan kebijakan yang ada. Terbukti setelah penandatanganan tersebut, kemudian Tiongkok memberikan bantuan luar

negeri untuk membangun infrastruktur Filipina yang ada dalam MoU tersebut. Dalam perjanjian yang ada dalam penandatanganan tersebut disebutkan bahwa Tiongkok dan Filipina mengakui potensi dari OBOR yang sejalan dengan rencana pembangunan *The Master Plan on ASEAN*.<sup>121</sup>

Keadaan tersebut memberikan Filipina pilihan antara menolak OBOR atau menerima OBOR dan menandatangani proyek tersebut. Kedua hal tersebut memberikan efek yang berpengaruh pada kondisi strategis perekonomian Filipina. Seperti yang dikatakan oleh Holsti dimana sebuah negara percaya bahwa ancaman utama terhadap keutuhan wilayahnya bisa terjadi melalui pembatasan negaranya untuk mengakses sumber daya ataupun tenaga kerja.<sup>122</sup> Dalam hal ini, pembatasan yang dimaksud merupakan pembatasan sumberdaya melalui konektivitas jalur ekonomi OBOR. Ketika Filipina tidak menerima kerjasama OBOR, maka dapat dipastikan bahwa negaranya akan kehilangan potensi pengembangan ekonomi yang dibawa oleh OBOR. Dengan kata lain, terdapat batasan yang mengacu pada ketidakmampuan Filipina dalam mengakses potensi yang menghubungkan negaranya dengan negara lain. Ketika Filipina bersedia bekerjasama dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur tersebut, maka keputusan yang diambil oleh Filipina sejalan dengan nilai inti yang dimiliki dimana bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian negaranya untuk memiliki kesinambungan ekonomi.

---

<sup>121</sup> Ministry of Foreign Affairs of China, *Joint Statement between the Government of The People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines*, [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjdt\\_665385/2649\\_665393/t1511299.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1511299.shtml), diakses pada tanggal 10 Juli 2019

<sup>122</sup> K. J. Holsti, Op. Cit, hal 177.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kepentingan inti yang dimiliki oleh Filipina dalam kesediannya mendukung proyek OBOR melalui penandatanganan MoU dan juga penerimaan ODA dari Tiongkok, merupakan kepentingan untuk mendapatkan akses pendanaan dan juga konektivitas pasar yang diciptakan melalui proyek OBOR tersebut. Keputusan Filipina dalam kerjasamanya dengan Tiongkok, memiliki karakteristik waktu yang singkat dimana dengan menandatangani MoU, maka Filipina telah mengamankan potensi dengan waktu yang singkat. Penandatanganan tersebut juga berpengaruh pada kestabilan negaranya dengan menyetujui proyek OBOR yang merupakan proyek jangka panjang dan dapat memberikan potensi ekonomi yang berkesinambungan.

## **5.2 Kepentingan Jangka Menengah**

Dalam variabel ini, penulis akan menjelaskan mengenai kepentingan nasional Filipina dalam keputusannya masuk ke dalam proyek OBOR dan menerima ODA dari Tiongkok. Jika dilihat dari variabel kepentingan jangka menengah menurut Holsti, kepentingan jangka menengah merupakan kepentingan yang syarat akan kebutuhan ekonomi suatu negara. Dijelaskan bahwa suatu kepentingan jangka menengah memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap harapan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi domestik.<sup>123</sup> Dalam kepentingan ini juga ditekankan aspek mengenai hubungan antar negara yang saling melengkapi dikarenakan setiap negara memiliki

---

<sup>123</sup> K. J. Holsti. Op.Cit., hal 181

keterbatasan sumber daya ataupun keahlian teknis.<sup>124</sup> Pemenuhan kebutuhan ini merupakan dasar dari terciptanya kepentingan jangka menengah oleh suatu negara, dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh pada stabilitas politik dalam negeri ketika kebutuhan domestik tidak terpenuhi. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi domestik ini adalah dengan menerima bantuan luar negeri.

OBOR sendiri dalam tujuan terbentuknya merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menciptakan jalur perekonomian modern yang menghubungkan negara-negara di Asia-Eropa melalui jalur darat dan laut. Pembentukan jalur tersebut syarat akan tujuan negara dalam membangun jaringan perdagangan dimana hal tersebut nantinya diharapkan akan meningkatkan tingkat perekonomian domestik negara anggota. Filipina dalam menandatangani MoU memilih untuk mendukung secara penuh pembangunan OBOR khususnya jalur laut dalam *Maritime Silk Road*. Secara spesifik, Filipina menerima kerjasama yang berhubungan dengan pemberian bantuan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan infrastrukturnya. Keputusan ini akan dilihat dengan menggunakan tiga variabel yang nantinya akan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Filipina jika dilihat melalui tujuan jangka menengah.

### 5.2.1 *Economic Development Opportunities*

Sesuai dengan penjelasan Holsti, *Economic Development Opportunities* merupakan variabel yang menunjukkan hubungan kerjasama antar negara dalam kasus ini kerjasama Filipina dengan Tiongkok berkaitan

---

<sup>124</sup> Ibid.

dengan proyek OBOR. Dalam variabel ini, penulis menitikberatkan pada tingkat pemasukan dana ODA yang diberikan oleh Tiongkok dari waktu ke waktu. Keberadaan ODA merupakan sebuah indikator yang dapat menjelaskan apa keuntungan yang diberikan dari kerjasama ini terhadap pembangunan infrastruktur di Filipina. Holsti menjelaskan ketika terdapat kenaikan atau penurunan nilai investasi suatu negara kepada negara tujuan, maka hal tersebut dapat menjelaskan apakah negara tersebut berhasil ataupun gagal dalam melakukan pengembangan ekonomi. Ketika ada kenaikan yang terjadi, hal tersebut menandakan keberhasilan dari tujuan suatu negara untuk mengembangkan ekonominya begitu pula sebaliknya.<sup>125</sup>

Pada kasus ini, terdapat beberapa faktor yang dapat dilihat ketika menganalisis soal peluang ekonomi yang diciptakan dari terbentuknya kerjasama ini. Salah satunya, kita dapat melihat inti dari kebijakan OBOR sendiri. Kebijakan OBOR yang berorientasi pada pengembangan konektivitas, merupakan salah satu bentuk dari ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dengan adanya proyek ini, maka perpindahan barang ataupun jasa akan lebih mudah dan dapat memberikan akses hubungan dagang dengan negara lain. Sesuai dengan nilai yang dibawa oleh OBOR, hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan program pembangunan yang dicetuskan oleh Presiden Duterte yang berfokus dalam pembangunan infrastruktur melalui program *Build, Build Build* (BBB). OBOR yang merupakan tujuan

---

<sup>125</sup> Ibid.

pembangunan jangka panjang, memberikan sebuah jaminan bahwa setelah terbentuknya OBOR, potensi-potensi ekonomi tidak akan berhenti sampai di sana. Ketika OBOR telah terealisasi, maka secara tidak langsung akan membentuk akses pasar bagi negara-negara yang dilewatinya. Filipina yang masuk dan menyetujui MoU tersebut secara tidak langsung juga memastikan bahwa negaranya akan ikut terbantu akan keberadaan OBOR. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan membuat pelabuhan Davao yang ada di Filipina sebagai salah satu tempat perhentian jalur *Maritime Silk Road*.<sup>126</sup> Hal tersebut secara langsung akan memberikan potensi perekonomian terhadap Filipina.

Tiongkok sendiri menjanjikan dana infrastruktur sebesar USD 24 Miliar pada tahun 2016 kepada presiden Duterte pada kunjungan kenegaraan di Beijing.<sup>127</sup> Dana yang diberikan pada tahun 2017 sendiri sudah mencapai USD 7.3 Miliar dimana hal tersebut telah memberikan kenaikan jumlah infrastruktur dari Tiongkok sebesar 5.6% dari sebelumnya.<sup>128</sup> Dana tersebut jelas memberikan Filipina kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan potensi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Ketika dihadapkan dengan para investor, masalah utama yang muncul adalah bagaimana kurangnya infrastruktur di Filipina menyebabkan ketidakpercayaan investor untuk menginvestasikan danannya di Filipina. Hal

---

<sup>126</sup> Research, 2 November 2018, *BRI Funding Sees China and the Philippines Commit to Building Bridges*, <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/International-Market-News/BRI-Funding-Sees-China-and-the-Philippines-Commit-to-Building-Bridges/imn/en/1/1X000000/1X0AFM8Y.htm>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> Ibid.

tersebut menyebabkan potensi-potensi pengembangan ekonomi akan terhambat ketika masalah kekuarangan infrastruktur tersebut tidak diatasi dengan cepat. Hal ini menyebabkan pemerintah Filipina dalam membentuk kebijakan akan berusaha untuk memfokuskan programnya dalam pemenuhan infrastruktur.

Dengan melihat penjabaran di atas, dapat kita katakan bahwa sebenarnya OBOR telah memberikan peluang bagi perekonomian Filipina untuk berkembang. Dana yang diberikan melalui OBOR secara langsung berdampak pada terbukanya akses pasar bagi Filipina yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan negaranya.

### 5.2.2 Filipina dan Usahanya Meningkatkan Prestise Negara

Prestise dalam sebuah kepentingan nasional, disebutkan oleh Holsti merupakan kepentingan yang biasanya dimiliki oleh negara-negara industri atau negara besar.<sup>129</sup> Tetapi pada era saat ini, prestise suatu negara dapat dilihat dari eksistensinya yang dapat munculkan ke dunia internasional. Dalam kepentingan ini, Filipina sebagai negara berkembang, tidak berfokus pada peningkatan jumlah pasukan ataupun kapabilitas militer. Untuk memperlihatkan eksistensi tersebut, Filipina dapat menggunakan beberapa indikator yang memberikan kesan peningkatan yang terjadi di negaranya. Beberapa hal tersebut dapat kita lihat dari peningkatan perekonomian seperti

---

<sup>129</sup> K. J. Holsti, Op.Cip., Hal 182.

berkurangnya jumlah kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan peningkatan yang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Filipina dalam pemerintahan Presiden Duterte terlihat sangat revolusioner dan terbilang radikal dalam melakukan peningkatan ekonomi negaranya. Dilihat dari perbedaan pendekatan mengenai pendanaan program pembangunan yang dicantumkan dalam program BBB. Seperti yang telah kita ketahui, Duterte melakukan ekspansi untuk memperluas pendanaan yang digunakan dalam membangun infrastruktur melalui programnya. Pada pemerintahan sebelumnya, Filipina yang hanya menggunakan pendanaan dari publik dan privat mengalami proses pembangunan yang kurang memuaskan dengan beberapa proyek pembangunan yang tertunda. Hal tersebut dikarenakan proses pendanaan yang kurang efisien karena hanya menggunakan sumber dana yang terbatas. BBB kemudian merubah hal tersebut dan memasukkan pendanaan dengan menerima ODA ataupun FDI dari luar negeri termasuk dengan Tiongkok.

Pendanaan yang dilakukan bersama Tiongkok merupakan bentuk dari penandatanganan MoU yang menyebutkan bahwa Filipina dan Tiongkok akan bekerjasama dalam membangun infrastruktur dalam rangka merealisasikan proyek OBOR. Kemudian berujung pada pemberian dana sebesar USD 7,3 Miliar melalui kerjasama OBOR.<sup>130</sup> Dengan dana yang diberikan, Filipina

---

<sup>130</sup> Research, 2 November 2018, *BRI Funding Sees China and the Philippines Commit to Building Briges*, <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/International-Market->

berusaha meningkatkan infrastruktur demi meningkatkan statusnya dalam hal kapasitas ekonomi di sistem internasional.

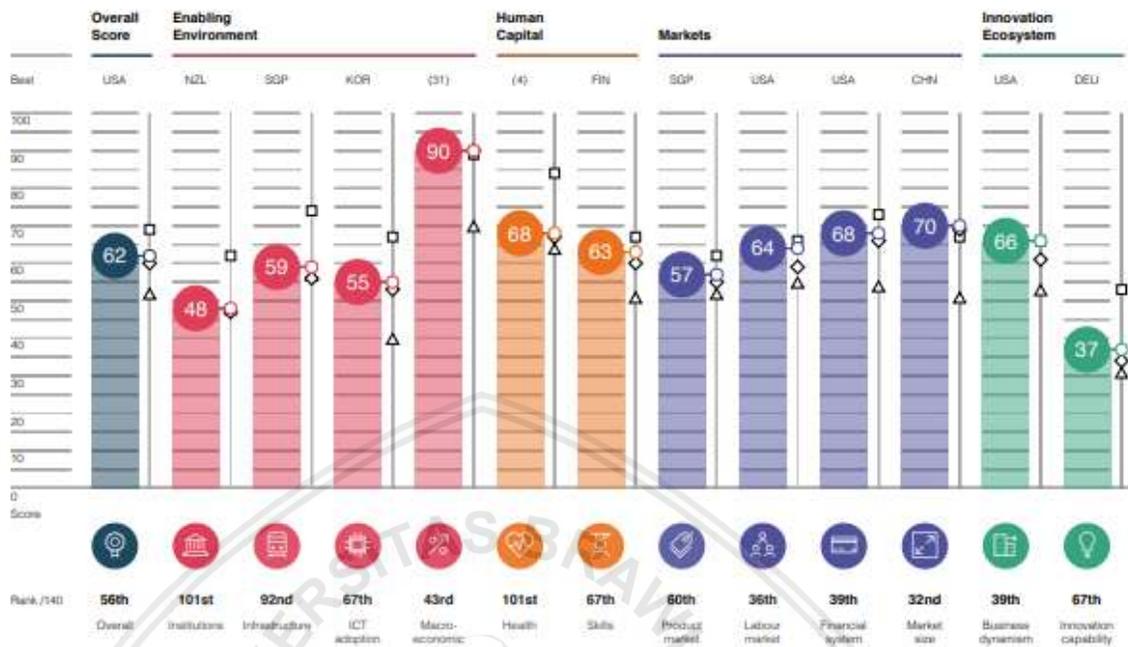
Keberadaan status Filipina yang memiliki peringkat paling rendah diantara negara di ASEAN-5 yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan termasuk Filipina pada tahun 2015.<sup>131</sup> Hal ini tentu membuat Filipina merasa perlu meningkatkan kapasitas infrastrukturnya. Dengan demikian, Filipina dapat meningkatkan prestisenya sebagai negara dengan infrastruktur yang memadai dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini juga dapat dilihat melalui peringkat yang diberikan dalam *Global Competitiveness Index* yang memperlihatkan peringkat infrastruktur Filipina dibandingkan negara lain. Pada GCI yang dikeluarkan pada tahun 2018, Filipina mendapatkan peringkat 92 dalam hal infrastruktur dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Peringkat dari keseluruhan sendiri, Filipina berada pada urutan ke 56 yang mana menunjukkan peningkatan sebanyak 12 peringkat dari tahun 2017. Peningkatan ini menjadikan tanda bahwa Filipina berhasil meningkatkan prestisennya dalam hal pembangunan infrastruktur.

---

News/BRI-Funding-Sees-China-and-the-Philippines-Commit-to-Building-Bridges/imn/en/1/1X000000/1X0AFM8Y.htm, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

<sup>131</sup> Philippines Development Plan 2017-2022, <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/phi169293.pdf>, Diakses pada tanggal 13 Juli 2019

Gambar 4. Peringkat Filipina dalam Global Competitiveness Index 2018



Sumber: Global Competitiveness Research 2018, <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>

Selain melihat perkembangan infrastruktur di Filipina, kita juga dapat melihat tingkat pengurangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Hal yang ditargetkan dalam pemenuhan kepentingan prestis ini ada pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan yang berada dalam program peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh Filipina. Dana OBOR yang didapatkan dari Tiongkok merupakan dana yang spesifik digunakan dalam membangun infrastruktur di Filipina. Secara tidak langsung, maka pendanaan yang digunakan, syarat akan kepentingan Filipina dalam mengembangkan prestisenya.

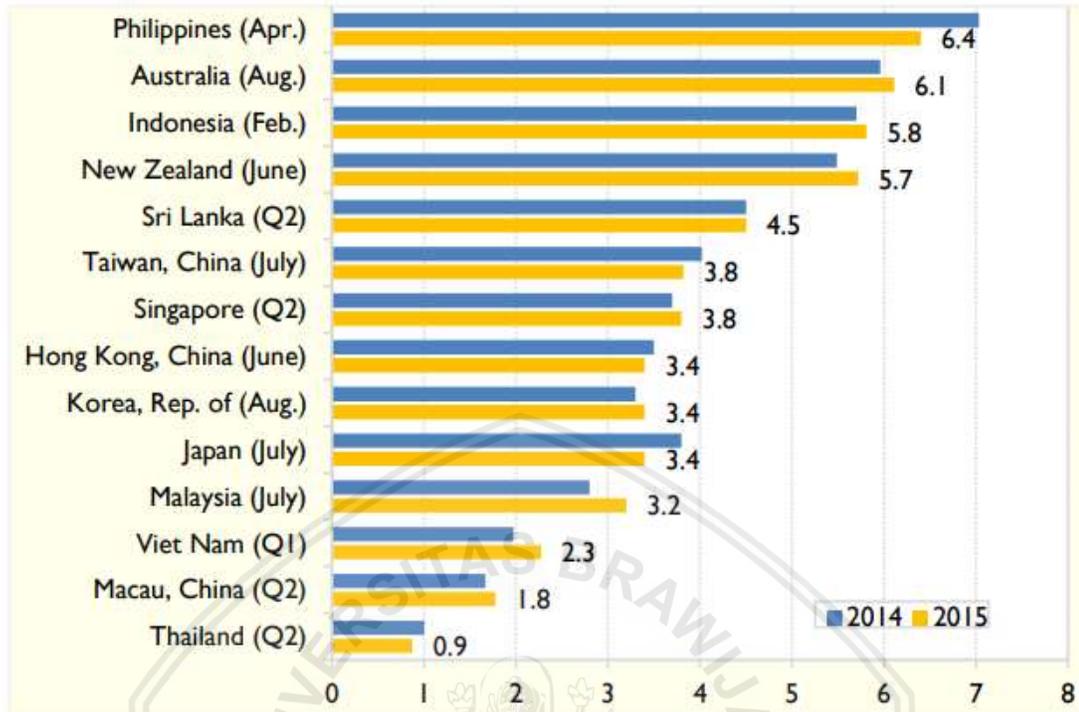
Jika dilihat, Filipina sendiri merupakan negara yang memiliki angka sebesar 6.4 % pada tahun 2015. Pada saat itu Filipina memiliki performa yang cukup buruk dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hal tersebut merupakan sebuah status yang tidak dapat dibanggakan oleh negara manapun. Maka dari itu, Duterte dalam program BBB secara seksplisit menyebutkan bahwa programnya akan mengurangi angka pengangguran yang diatasi dengan melakukan proyek infrastruktur sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik. Hal ini kemudian berhasil ditekan menjadi 5.1 % per Juni 2019.<sup>132</sup> Hal tersebut merupakan sebuah peningkatan yang cukup signifikan mengingat gap dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yaitu Indonesia pada tahun yang sama hanya sekitar 0,1 %.<sup>133</sup> Peningkatan tersebut merupakan sebuah pencapaian yang dilakukan oleh Filipina sehingga dapat meningkatkan prestinya dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dilakukan dengan pengadaan proyek infrastruktur melalui BBB.

---

<sup>132</sup> Unemployment Rate Asia, <https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=asia>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>133</sup> Ibid

Bagan 2. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Negara



Sumber: ILO Asia-Pacific Labour Market Update October 2015

### 5.2.3 *Self Extention* Filipina ke Tiongkok

Seperti yang dijelaskan oleh Holsti, kepentingan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan ekonomi dan strategi, dan secara stimulan mengembangkan sistem nilai politik dan ideologi ke luar negeri.<sup>134</sup> Dalam melihat kepentingan ini, penulis menjelaskan pengembangan khusus pada nilai ekonomi dan strategi Filipina. Variabel ini, erat kaitannya dengan usaha Filipina dalam memperluas jangkauan tangannya ke Tiongkok yang ditandai dengan kerjasama OBOR oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini merupakan runtutan kejadian setelah Filipina menyatakan kebijakan politik

<sup>134</sup> K. J. Holsti, Op.Cit., hal 183.

luar negeri yang baru dalam masa pemerintahan Duterte yang disebut sebagai *Pivot To China*.<sup>135</sup>

Kebijakan tersebut merupakan bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Filipina dalam melihat perkembangan politik internasional pada saat itu. Filipina yang sebelumnya dikatakan dekat dengan Amerika Serikat, mulai menunjukkan sikapnya terhadap Amerika saat Duterte terpilih menjadi presiden. Hal tersebut merupakan sikap yang dimiliki Duterte dalam pandangannya melihat geo-strategi untuk menjauhkan diri dari AS dan berpaling untuk membangun kerjasama keamanan dengan pemegang kekuasaan lainnya, yaitu Tiongkok.<sup>136</sup> Hal ini juga dilihat sebagai ketidakaktifan Amerika dalam membangun infrastruktur global yang menguntungkan bagi Filipina.<sup>137</sup> Berbeda dengan Tiongkok yang membentuk kerjasama dalam bidang infrastruktur untuk membangun konektivitas negara dalam bentuk OBOR.

Sebagai negara yang menjadi sentral kekuasaan di Asia, Filipina yang merupakan negara penduduk Asia lebih mementingkan kerjasama dengan pihak yang lebih dekat dalam hal regional. Hal tersebut menjadikan kerjasama Filipina-Tiongkok sebuah kerjasama strategis yang dapat memberikan keuntungan secara politik dan ekonomi bagi Filipina. Dengan melakukan

---

<sup>135</sup> Edcel John A. Ibarra, *The Philippine's "Pivot" to China A Review of Perspectives*, <http://www.fsi.gov.ph/the-philippines-pivot-to-china-a-review-of-perspectives/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019

<sup>136</sup> Ibid.

<sup>137</sup> Ibid.

*Pivot to China*, Duterte menunjukkan bahwa Filipina merupakan negara yang lebih melihat hubungannya dengan Tiongkok bukanlah hal yang mustahil.

Dengan adanya kebijakan ini, Filipina juga memberikan kesempatan yang besar dalam diplomasinya terhadap sengketa Laut China Selatan yang telah ada sejak waktu yang lama. Untuk melakukan hal tersebut, selain menggunakan politik luar negeri sebagai alat, Filipina juga melakukan pendekatan secara Ekonomi dengan bergabung pada proyek OBOR oleh Tiongkok. Keberadaan proyek OBOR sendiri memberikan Filipina alat dalam melakukan diplomasi ke depannya seperti mengamankan bantuan luar negeri dan menjadikan Tiongkok sebagai partner perdagangan yang strategis. Hal ini juga didasari oleh keberadaan Tiongkok sebagai partner dagang terbesar kedua bagi Filipina.<sup>138</sup> Dengan demikian, Filipina melakukan perpanjangan kekuasaan ketika mereka menyetujui kebijakan OBOR dan dapat menggunakan pengaruhnya terhadap Tiongkok ketika negaranya membutuhkan bantuan luar negeri.

### **5.3 Kepentingan Jangka Panjang Filipina**

Dalam kepentingan ini, Holsti menjelaskan secara spesifik bahwa nilai yang ingin diangkat tidak harus sejalan dengan kepentingan sebelumnya. Kepentingan ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai ketika kedua kepentingan sebelumnya telah tercapai dikarenakan kepentingan jangka panjang dapat memiliki bentuk yang sangat

---

<sup>138</sup> Ibid.

berbeda dan dapat memengaruhi hubungan serta dapat bersinggungan dengan kepentingan negara lain.<sup>139</sup> Kita dapat melihat keterkaitan antara kebijakan atau sikap yang ditunjukkan melalui cita-cita, visi, atau program yang sekiranya telah berjalan di negara tersebut. Kepentingan ini juga tidak memiliki batasan waktu yang jelas untuk dipenuhi sehingga Holsti dalam bukunya menyebutkan kepentingan ini sbagai sebuah peran internasional sari suatu negara.<sup>140</sup>

Seperti yang telah dijelsakan melalui variabel-variabel sebelumnya, terlihat bahwa Filipina sebagai negara yang bekerjasama dengan Tiongkok telah mencapai kepentingannya. Dalam kepentingan inti dari Filipina, negaranya telah berhasil melakukan pengamanan kedaulatannya yang berfokus pada pembatasan akses yang diberikan ketika meraka tidak bekerjasama dalam proyek OBOR. Kepentingan yang sebelumnya mengarah pada kekuatan militer, sekarang telah berubah menjadi kekuatan ekonomi sebagai kepentingan utama Filipina. Hal tersebut merpakan salah satu usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan negaranya dalam sistem ekonomi internasional.

Untuk variabel kepentingan jangka menengah, Filipina melakukan kerjasama dengan Tiongkok melalui OBOR merupakan usahanya dalam memenuhi kepentingan dalam negeri. Seperti pada *Increase Development Opportunities*, kita dapat melihat kepentingan yang diangkat yaitu pengembangan infrastruktur melalui pendanaan ODA yang diberikan salah satunya oleh Tiongkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan kerjasama terhadap Tiongkok, maka kebutuhan dari pembangunan

---

<sup>139</sup> K. .J. Holsti, Op.Cit., hal 184.

<sup>140</sup> Ibid.

infrastruktur tersebut akan terjamin secara finansial, ini kemudian diindikasikan akan memberikan perkembangan ekonomi domestik bagi Filipina. *Increase Prestige* sendiri merupakan usaha Filipina dalam menonjolkan eksistensinya terhadap negara-negara yang ada di dalam sistem internasional dengan meningkatkan perekonomian dalam hal pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta pemerintahan yang transparan. Hal ini dibuktikan dengan naiknya peringkat Filipina dalam Global Competitiveness Ranking dalam hal infrastruktur. Terakhir dalam kepentingan jangka menengah dilihat dari kemampuan Filipina dalam melakukan *Self-Extension* ke Tiongkok melalui kebijakan politik luar negeri *Pivot to China* yang mengindikasikan bahwa Tiongkok merupakan salah satu partner dagang yang diperhitungkan dalam perekonomian Filipina.

Melihat kedua kepentingan tersebut telah dipenuhi, terdapat kepentingan jangka panjang yang dimiliki oleh Filipina. Dapat dilihat kepentingan sebelumnya merupakan kepentingan yang merujuk pada pembangunan ekonomi baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Untuk kepentingan ini, tujuan suatu negara tidaklah harus sejalan dengan kepentingan sebelumnya, karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan visi jangka panjang yang dimiliki oleh Filipina. Walaupun demikian, kepentingan ekonomi juga masih dapat dikatakan sebagai kepentingan jangka panjang ketika hal tersebut sejalan dengan visi Filipina sebagai negara. Hal ini dapat dilihat ketika Filipina melakukan *Pivot to China*, hal tersebut mengakibatkan ketidakstabilan pada hubungannya dengan Amerika. Ketidakstabilan ini diterima oleh Filipina karena hal

tersebut sejalan dengan visi dari Filipina itu sendiri yang tercantum dalam program *Build, Build, Build* pada masa pemerintahan Duterte.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kepentingan jangka panjang Filipina, selain menginginkan untuk memperkuat perekonomiannya, juga erat kaitannya dengan visi Filipina untuk melepaskan pengaruh Amerika terhadap negaranya. Keberadaan Amerika dianggap tidak baik oleh Presiden Duterte. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Filipina yang sempat menjadi koloni Amerika Serikat pada tahun 1898.<sup>141</sup> Fakta tersebut membuat Filipina merasa bahwa negaranya hanya dijadikan sebagai alat untuk memasukkan pengaruh Amerika dalam sengketa Laut China Selatan.<sup>142</sup> Duterte juga mengatakan bahwa pada saat ini, Filipina tidak akan mampu melawan Tiongkok dan jika diteruskan maka nyawa prajuritnya akan melayang dengan sia-sia.<sup>143</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya Filipina sudah mulai menggeser pendekatannya terhadap Tiongkok. Keberadaan Tiongkok yang selama ini menjadi rival Filipina, mulai diubah dengan melakukan pendekatan secara ekonomi. Pendekatan tersebut merupakan keputusan Filipina dalam menggunakan pendanaan dari Tiongkok dan turut serta membangun OBOR sebagai strategi infrastruktur regional. Hal ini kemudian menjadikan pendekatan yang dilakukan kepada Tiongkok merupakan kepentingan jangka panjang untuk merubah pendekatannya terhadap negara mana yang akan dijadikan sebagai aliansi.

---

<sup>141</sup> CIA, Philippines, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html#Intro>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>142</sup> RT News, <https://www.rt.com/news/463698-duterte-china-war-usa/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>143</sup> Ibid.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Terdapat tiga poin penting yang dapat menjelaskan kepentingan nasional Filipina dalam bergabung pada proyek OBOR dan menerima dana bantuan dari Tiongkok pada tahun 2017, yaitu;

Pada tujuan pertama dalam kepentingan dan nilai inti Filipina, terdapat kepentingan krusial yang menyebabkan Filipina bersedia melakukan kerjasama dengan Tiongkok, yaitu dengan bekerjasama dengan Tiongkok, Filipina dapat mencegah terjadinya pembatasan secara ekonomi berupa akses pasar dan sumber daya ketika proyek OBOR dilaksanakan. Kepentingan tersebut dilakukan dengan cara menandatangani MoU pada tahun 2017 demi mengamankan potensi strategis secara singkat dan memiliki dampak yang berkelasngungan.

Kedua, tujuan jangka menengah Filipina dapat terlihat dari usahanya dalam menjaga peluang ekonomi, prestise, dan kemampuan Filipina dalam memberikan pengaruhnya terhadap Tiongkok. Pada kepentingan menjaga peluang ekonomi, bergabungnya Filipina ke dalam OBOR merupakan langkah untuk meningkatkan bantuan luar negeri melalui ODA dan FDI untuk menciptakan pembangunan infrastruktur dimana dengan meningkatnya infrastruktur tersebut, maka peluang pertumbuhan ekonomi Filipina juga meningkat. Untuk kepentingan dalam meningkatkan prestise, Filipina bersedia mendukung OBOR dengan tujuan

meningkatkan statusnya dalam kawasan ASEAN sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan perekonomian, berkurangnya kemiskinan, dan pengangguran di Filipina, dengan menggunakan program baru oleh Presiden Duterte yang disebut sebagai *Build, Build, Build Program*. Dalam usahanya melakukan *Self-Extention*, Filipina menciptakan kebijakan politik luar negeri yang disebut sebagai *Pivot to China* dimana hal tersebut merupakan usaha Filipina dalam menjalin hubungan baik kepada Tiongkok. Dengan melakukan hal tersebut maka Filipina dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap Tiongkok dan berpengaruh pada jumlah investasi yang diberikan pada Filipina oleh Tiongkok.

Kepentingan terakhir yaitu kepentingan jangka panjang, Filipina memiliki kepentingan untuk mengubah pendekatannya yang pada awalnya merujuk kepada Amerika Serikat menjadi pendekatan pada Tiongkok. Hal tersebut merupakan usaha Filipina yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Presiden Duterte yang menganggap bahwa negaranya bukanlah negara boneka yang dipengaruhi oleh Amerika. Dengan bergabungnya Filipina dalam proyek OBOR, maka hal tersebut menjadikan tanda bahwa Amerika tidak lagi menjadi partner utama dalam membangun negaranya dan sekaligus merealisasikan visi Filipina untuk menjadi negara dengan pembangunan yang kuat.

## 6.2 Saran

Penulis telah menjabarkan kepentingan nasional Filipina dalam keputusannya bergabung pada proyek One Belt One Road oleh Tiongkok. Hal ini merupakan pandangan yang spesifik ditujukan pada Filipina dan tindakannya yang dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya. Dengan kata lain, ada kesempatan bagi tulisan selanjutnya untuk menganalisis kepentingan nasional dalam prespektif Tiongkok. Terlebih lagi, konsep kepentingan nasional oleh Holsti juga mendukung bagaimana variabel-variabel dalam konsep ini lebih mudah untuk menjelaskan kepentingan negara besar termasuk Tiongkok.

Selain melihat Filipina sebagai subjek dalam kerjasama OBOR, bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk melihat OBOR secara lebih mendalam dapat menggunakan konsep lain dalam menganalisis kerjasama ini. Penulis selanjutnya juga dapat menggunakan negara lain sebagai objek penelitian yang juga berkaitan dengan kerjasama OBOR oleh Tiongkok.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Aoyama, Rumi. 2016. *One Belt, One Road: China's New Global Strategy*. Journal of Contemporary East Asia Studies.
- Cai, Peter. 2017. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Australia: Lowy Institute.
- Holsti, K. J. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. U.S.A: Prentice-Hall, Inc. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. Bandung: Binacipta
- Punch, Keith F. 2005 (2<sup>nd</sup> ed). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publication Ltd.

### Artikel, Berita, Working Paper, dan Dokumen Lainnya:

- Antara News. 3 Mei 2016. *AIIB dan ADB tanda tangani MoU Penguatan Kerja sama*, di <https://www.antaraneews.com/berita/558630/aiib-dan-adb-tanda-tangani-mou-penguatan-kerja-sama> (diakses pada tanggal 27 Juni 2019).
- Aurora Almendral. 5 September 2018. *Forbes, Philippines Richest 2018: Billionaire Builders Push Ahead With Infrastructure Projects*, di <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2018/09/05/philippines-richest-2018-billionaire-builders-push-ahead-with-infrastructure-projects/#748709fe70f4> (diakses pada tanggal 5 Juli 2019)
- Asian Infrastructure Investment Bank. *Introduction*, di <http://www.aiib.org/html/aboutus/introduction/history/?show=0> (diakses pada 27 Juni 2019).
- BBC. 30 Oktober 2015. 'Pukulan' bagi China dalam Sengketa dengan Filipina, di [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151029\\_dunia\\_cina\\_filipina](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151029_dunia_cina_filipina) (diakses pada 24 Juni 2019).
- Badkar, Mamta. 17 Juni 2013. Business Insider. *China Stimulated Its Economy Like Crazy After the Financial Crisis* di <https://www.businessinsider.com/chinas-excess-capacity-problem-2013-6/?IR=T> (diakses pada tanggal 28 Juni 2019).
- Bisnis. 11 Mei 2017. KTT OBOR: Upaya China Meningkatkan Pengaruhnya Di Dunia, di <http://finansial.bisnis.com/read/20170511/9/652833/ktt-obor-upaya-china-meningkatkan-pengaruhnya-di-dunia> (diakses pada 10 Januari 2018).

\_\_\_\_\_. 22 Maret 2019. Proyek OBOR China Diyakini Berdampak Positif bagi Indonesia, di <https://bali.bisnis.com/read/20190322/537/903186/proyek-obor-china-diyakini-berdampak-positif-bagi-indonesia> (diakses pada 26 Juni 2019).

Central Committee of the Communist Party of China. 2016. *The 13<sup>th</sup> Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016- 2020)*. Beijing, China: Central Compilation & Translation Press.

*China Pakistan Economic Corridor FAQs*. di <http://cpec.gov.pk/faqs> (diakses pada 15 November 2017).

Council of Foreign Relations. *China's Massive Belt and Road Initiative*, di <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative> (diakses pada 25 Juni 2019).

Congressional Research Service. *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, di <https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf> (diakses pada 24 Juni 2019).

China-ASEAN Free Trade Area, di [http://www.china.org.cn/business/node\\_7233287.htm#a1](http://www.china.org.cn/business/node_7233287.htm#a1) (diakses pada 27 Juni 2019)

CNN. 12 Mei 2017. *Just what is this One Belt, One Road thing anyway?*, di <http://edition.cnn.com/2017/05/11/asia/china-one-belt-one-road-explainer/> (diakses pada 1 Juni 2017).

Cronology of China's Belt and Road Initiative, di [http://english.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.htm](http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm) (diakses pada 27 Juni 2019).

Ebbighausen, Rodion. 4 Maret 2015. DW. *Pangkalan Militer di Laut China Selatan*, di <https://www.dw.com/id/pangkalan-militer-cina-di-laut-cina-selatan/g-18292381> (diakses pada tanggal 30 Juni 2019).

Export.gov, *Philippines-Infrastructure*, <https://www.export.gov/article?id=Philippines-Transport-Infrastructure>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

Foreign Service Institute. *The Belt and Road Initiative and Philippine Participation in the Maritime Silk Road*, di <http://www.fsi.gov.ph/the-belt-and-road-initiative-and-philippine-participation-in-the-maritime-silk-road/> (diakses pada 25 Juni 2019).

FMPRC. *President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries*. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/topics\\_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh\\_665686/t1076334.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml) (diakses pada 1 Maret 2019).

- Jane Parlez. U.S. *Opposing China's Answer to World Bank*, di <http://www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2019).
- Jeremy Paltiel. 2010. *Structure and Process in Chinese Foreign Policy: Implication for Canada*. Canadian International Council.
- Kompas. 11 April 2012. ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan, di <http://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan> (diakses pada 27 September 2017).
- Mae D. M, Sara. *Understanding the 'Build, Build, Build' Program*, di <https://business.inquirer.net/254682/understanding-build-build-build-program> (diakses pada tanggal 5 Juli 2019)
- Martin A. Weis, Congressional Research Service, Asian Infrastructure Bank (AIIB), New York Times. 4 Juni 2013. *Xi Jinping's Chinese Dream*, di <http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html> (diakses pada 12 Januari 2018).
- O. de Vera, Ben. 28 September 2016. Inquirer. *Duterte gov't Readies Fund to Join China-led AIIB*, di <https://business.inquirer.net/215531/duterte-govt-readies-fund-join-china-led-aiib> (diakses pada 25 Juni 2019).
- Placido, Dharel. 8 September 2016. ABS-CBN News. *Obama to Duterte: Do war on drugs 'the right way'*, di <https://news.abs-cbn.com/news/09/08/16/obama-to-duterte-do-war-on-drugs-the-right-way> (diakses pada tanggal 30 Juni 2019).
- Pakistan Today. *Between the Devil and Deep Gwadar Waters*. (<https://www.pakistantoday.com.pk/2015/12/05/between-the-devil-and-deep-gwadar-waters/>), (diakses pada tanggal 28 Juni 2019)
- PPP Center. *Philippines sending more on infrastructure, Aquino tells investors*, di [https://ppp.gov.ph/in\\_the\\_news/philippines-spending-more-on-infrastructure-aquino-tells-investors/](https://ppp.gov.ph/in_the_news/philippines-spending-more-on-infrastructure-aquino-tells-investors/), (diakses pada tanggal 4 Juli 2019).
- Puspita Sari, Amanda. 14 April 2016. CNN. *AS dan Filipina Patroli Militer Bersama di Laut China Selatan*, *CNN Indonesia*, di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160414195014-113-124054/as-dan-filipina-patroli-militer-bersama-di-laut-china-selatan>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2019)
- Quartz. 2017, 15 Mei. *Your guide to understanding OBOR, China's new Silk Road Plan*, (<http://www.business.hsbc.com/belt-and-road/guide-to-understanding-obor#>), (online), diakses pada 1 Juni 2017

- Rappler. 8 September 2016. *Obama, Duterte Clash Over Brutal Crime War*, di <https://www.rappler.com/nation/145656-duterte-obama-clash-crime-drug-war>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2019).
- Ray, Michael. 14 Mei 2019. *Rodrigo Duterte: Presiden of the Philippines*, di <https://www.britannica.com/topic/Rodrigo-Duterte> (diakses pada tanggal 30 Juni 2019).
- Road Initiative and Philippines Participation in the maritime Silk Road, di <http://www.fsi.gov.ph/the-belt-and-road-initiative-and-philippine-participation-in-the-maritime-silk-road/> (diakses pada tanggal 28 Juni 2019.)
- Sindo. 2015, 15 Juni. AS dan China Sudah Berada di Jalur Perang, (online), (<https://international.sindonews.com/read/1012849/40/as-dan-china-sudah-berada-di-jalur-perang-1434359096>, diakses pada 27 September 2017).
- State Council PRC. *Full text: Action plan on the Belt and Road Initiative*, di [http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content\\_281475080249035.htm](http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm) (Diakses pada tanggal 20 Juni 2019).
- The Diplomat. 2017, 12 Mei. *Belt and Road Attendees List*. (online). (<https://thediplomat.com/2017/05/belt-and-road-attendees-list/>, diakses pada 10 Januari 2018).
- \_\_\_\_\_. 17 Maret 2019. *From Hardware to Software: China's 2019 Military Budget and Priorities*, di <https://thediplomat.com/2019/03/from-hardware-to-software-chinas-2019-military-budget-and-priorities/> (diakses pada tanggal 27 Juni 2019).
- \_\_\_\_\_. 31 Desember 2015. *Philippines to (Finally) Join China's Asian Infrastructure Investment Bank*, di <https://thediplomat.com/2015/12/philippines-to-finally-join-chinas-asian-infrastructure-investment-bank/> (diakses pada 26 Juni 2019).
- The State Council The People's Republic of China. 2015, 28 Maret. *Chronology of China's Belt and Road Initiative*. Di [http://english.gov.cn/news/top\\_news/2015/04/20/content\\_281475092566326.html](http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.html) (diakses pada 1 Juni 2017).
- \_\_\_\_\_. 30 Maret 2015. *Full Text: Action Plan on the Belt and Road Initiative*, di [http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content\\_281475080249035.html](http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.html) (diakses pada 1 Juni 2017).
- Thomas Renard, *The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): China's New Multilateralism and the Erosion of The West*.

Top 10 Biggest Construction Companies in the Wold, <https://esub.com/top-10-biggest-construction-companies-in-the-world-and-what-makes-them-great/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

UNESCAP. 2015. *The Philippines-National Studies: Infrastructure Finance Strategies for Sustainable Development*, di [https://www.unescap.org/sites/default/files/3\\_Philippines%20National%20Study\\_printer%20rev.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/3_Philippines%20National%20Study_printer%20rev.pdf), diakses pada 27 Juni 2019.

Von Hein, Maththias. DW. *Xi Jinping and the 'Chinese Dream'*, <https://www.dw.com/en/xi-jinping-and-the-chinese-dream/a-43685630>, Diakses pada 20 Juni 2019.

Whaley, Floyd. 29 April 2012. New York Times. *Philippines Role May Grow as U.S. Adjusts Asia Strategy*, di <https://www.nytimes.com/2012/04/30/world/asia/philippines-role-may-grow-as-us-adjusts-asia-strategy.html> (diakses pada tanggal 29 Juni 2019).

World Bank, Philippines, <https://data.worldbank.org/country/philippines>, diakses pada 27 Juni 2019.

